

**PENGARUH KEBIJAKAN *TRAVEL WARNING* PEMERINTAH
AUSTRALIA TERHADAP TINGKAT KUNJUNGAN WISATAWAN
AUSTRALIA DI BALI**



Oleh:

Fanuel Yuda Saptera

NPM. 14430001

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Politik Dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SLAMET RIYADI

SURAKARTA

2019

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Persetujuan Pembimbing,
Surakarta, 20 Agustus 2019

Pembimbing I



Setyasih Harini, S.IP., M.Si.
NIPY. 0110.0366

Pembimbing II



Dr. GPH Dipokusumo, M.Si.
NIPY. 0111.0386

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan disahkan di hadapan Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan diterima untuk persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik.

Hari : Jumat
Tanggal : 30 Agustus 2019

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Setyasih Harini, S.IP., M.Si

()

Sekretaris : Dr. GPH Dipokusumo, M.Si

()

Penguji : Halifa Haqqi, S.IP., M.Si

()

Disahkan oleh
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Slamet Riyadi Surakarta



Dekan


Drs. Buddy Riyanto, M.Si
NIPY.0191.0139

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Fanuel Yuda Saptera
NPM : 14430001
Prodi : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

“ PENGARUH KEBIJAKAN *TRAVEL WARNING* PEMERINTAH AUSTRALIA TERHADAP TINGKAT KUNJUNGAN WISATAWAN AUSTRALIA DI BALI ”

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini benar-benar pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuam saya tidak berisi materi yang dipulikasikan atau ditulis orang lain atau telah digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di Perguruan Tinggi lain kecuali pada bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan.

Surakarta, 17 Agustus 2019

Yang Menyatakan

Fanuel Yuda Saptera
NPM. 14430001

MOTTO

*“ Just because something doesn’t do what you planned it to do, doesn’t mean it’s
useless “*

Thomas A. Edison

“ Kamu dapat merantaiku, kamu dapat menyiksaku, bahkan kamu dapat menghancurkan tubuh ini, tetapi kamu tidak akan dapat memenjarakan pikiranku

“

Fuhrer Adolf Hitler

“ Segala perkara dapat kutanggung bersama DIA yang memberi kekuatan kepadaku “

Filipi 4 : 13

“ Le Voyage est un Miracle de L’art “

“ Perjalanan adalah keajaiban dari sebuah seni “

Ipan Y. S

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Pertama kepada Tuhan YME di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang selalu membimbing, menyertai, dan memberkati.
2. Kedua Orang tua tercinta Tertius Agus S dan Wahyu Kusprihatin, serta Alm. Hanna Hartati dan adik – adik tercinta Apfia, Visti, Kiki, dan Leonard yang selalu mendoakan dan memotivasi selama penulis mengerjakan skripsi.
3. Teman-teman dekat tercinta yaitu Monica, Rosita, Kezia, Vellyzia yang selalu menghibur dan memberikan dukungan ketika dibutuhkan.
4. Teman-teman di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2014 yang telah berjuang bersama dari awal perkuliahan sampai akhir.
5. Rekan – rekan dan staff Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali yaitu Ida Bagus Alit, Nyoman, Yogi, Johanda dan seluruhnya atas doa dukungan, nasihat, dan motivasinya.
6. Teman-teman seluruh fakultas di Universitas Slamet Riyadi, Komunitas Osprey Indonesia, dan Cafe Racer Solo yang terus memberikan dukungan di suasana untuk menjernihkan pikiran
7. Teman – teman kopi se – solo raya dan jogja, Oksigen, Mika Coffee House, Amettati, Rumah Gimbo, Mas Boy, Merdue, dan Son’s of Son Coffee yang selalu memberikan tempat dan waktu ketika peneliti membutuhkan ruang dalam menyelesaikan tugas akhir
8. Serta semua pihak yang menanyakan tentang “ Bagaimana tugas akhir dan kapan sidang ? “ Cepetan Sidang “. Kalian telah membuat saya termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Yang terakhir semua pihak – pihak terkait yang belum bisa saya sebutkan satu per satu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya, skripsi dengan judul “ Pengaruh Kebijakan *Travel Warning* Pemerintah Australia terhadap Tingkat Kunjungan Wisatawan Australia di Bali ”, dapat diselesaikan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan peneliti.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Pada skripsi ini dibahas mengenai bagaimana pengaruh kebijakan *Travel warning* pemerintah Australia terhadap tingkat kunjungan wisatawan Australia di Bali. Kebijakan *Travel warning* dikeluarkan oleh pemerintah Australia sebagai melindungi warga negaranya dikarenakan adanya ancaman – ancaman bahaya terkait terorisme, kerusuhan, dan bencana alam di Indonesia dalam mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan Australia di Bali.

Dengan penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis mendapat dukungan, bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. DR. Ir. Sutardi, M. App. Sc, selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
2. Drs. Buddy Riyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

3. Ganjar Widhiyoga, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dan penguji dalam sidang skripsi.
4. Setyasih Harini S.IP., M.Si., selaku Pembimbing Utama dan GPH. Dipokusumo, M.Si., selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan saran, waktu serta bimbingan bagi penulis hingga sidang skripsi.
5. Dosen pengajar Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Halifa Haqqi, S.IP., M.Si., Dra. Christy Damayanti, M.Si, Ganjar Widhiyoga, Ph.D, Dra. Herning Suryo Sardjono, M.Si, Setyasih Harini, S.IP, M.Si, Lukman Fahmi, S.IP, M.Si, Dra. Damayanti Suhita, M.Si dan seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
6. Ida Bagus Alit Dharmaja, S.E di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebagai Kasi Analisa Pasar yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian.
7. Teman – teman di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2014 yang membantu dan berjuang bersama dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi.
8. Teman – teman HIMAH I UNISRI dan FKMH II Korwil IV yang selalu menjadi keluarga dimanapun kalian berada
9. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang sudah membantu dan selalu memberi dukungan pada penulis dalam mengerjakan skripsi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini tidak lain karena kemampuan penulis yang terbatas. Namun demikian penulis mengharapkan agar skripsi ini memberikan manfaat bukan hanya kepada penulis tetapi juga almamater dan pembaca agar menambah wawasan terutama yang tertarik dengan hubungan internasional.

Surakarta, 17 Agustus 2019

Fanuel Yuda Saptera
NPM. 14430001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
a. Bagi peneliti	6
b. Bagi pembaca	6
c. Bagi program studi	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Dasar Teori	8
1. Human Security	8
2. Konsep Good Neighbor Policy	11
B. Penelitian Terdahulu	13
C. Kerangka Berpikir	16
BAB III. METODE PENELITIAN	18
A. Jenis Penelitian	18

B. Sumber Data	19
C. Objek Penelitian	19
D. Teknik Pengumpulan Data.....	20
E. Tehnik Analisis Data	20
1. Reduksi Data	21
2. Penyajian Data	21
3. Verifikasi Data	21
BAB IV. PEMBAHASAN.....	22
A. Pentingnya Peran Hubungan Negara Indonesia bagi Australia	22
1. Bidang Ekonomi dan Perdagangan	23
2. Bidang Pendidikan dan Kesehatan	23
3. Bidang Keamanan	24
4. Bidang Pariwisata	24
B. Ancaman Indonesia bagi Australia	25
1. Peristiwa 9/11	25
2. Serangan Bom Bali I	28
3. Serangan Bom Bali II	30
4. Bencana Alam.....	34
C. Kebijakan <i>Travel Warning</i> Masa Pemerintahan Australia ...	36
1. PM Kevin Rudd (2007 – 2012 & 2013)	36
2. PM Julia Gillard (2010 – 2012)	38
3. PM Tony Abbot (2013 – 2015)	40
4. PM Malcolm Turnbull (2015 – 2018)	41
D. Penerapan <i>Travel Warning</i> pemerintah Australia	43
1. Level Kebijakan <i>Travel Warning</i>	43
2. Bentuk – bentuk <i>Travel Warning</i> Australia	48
a. Dokumen – Dokumen Resmi	48
b. Surat Kabar	49
c. Website dan Aplikasi Online	50

E. Dampak – dampak Kebijakan <i>Travel Warning</i>	51
1. Sosial	51
2. Ekonomi	52
3. Diplomasi dan Militer	52
F. Persepsi Wisatawan Australia terhadap <i>Travel Warning</i>	53
G. Tingkat Kunjungan Wisatawan Australia di Bali	57
BAB V. PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Latar Belakang Kebijakan <i>Travel Warning</i> Pemerintah Australia	2
Tabel 1.2. Level Travel Warning beserta Masing - Masing Nilai	
Keamanan.....	43

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1. Indeks Terorisme di Indonesia	32
Grafik 1.2. Tingkat Kunjungan Wisatawan Australia di Bali	57

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pengaruh kebijakan *Travel Warning* pemerintah Australia terhadap tingkat kunjungan wisatawan Australia di Bali. Kebijakan *Travel warning* adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh sebuah negara ke suatu negara dalam melindungi keamanan nasional bagi warga negaranya. Melalui kebijakan pemerintah Australia tersebut mempengaruhi hubungan sebuah negara dan tingkat kunjungan wisatawan Australia di Bali. Penelitian ini menggunakan teori keamanan manusia “ *Human Security* ” dan teori hubungan bilateral melalui konsep “ *Good Neighbor Policy* “. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan *Travel warning* pemerintah Australia terhadap tingkat kunjungan wisatawan Australia di Bali. Metode penelitian di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber pengumpulan data sekunder. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan dokumen – dokumen resmi, journal, surat kabar dan buku dengan penjabaran deskriptif. Dari data penelitian mengenai pengaruh kebijakan *Travel warning* pemerintah Australia terhadap tingkat kunjungan wisatawan Australia di Bali, peneliti menemukan bahwa kebijakan *Travel warning* tidak hanya sebuah kebijakan dalam melindungi warga negara Australia, tetapi kebijakan tersebut mampu memberikan pengaruh terhadap tingkat kunjungan wisatawan Australia dan memberikan dampak terhadap negara Indonesia terutama di Bali.

Kata kunci : *Travel warning, Human security, Good Neighbor Policy, Kunjungan wisatawan, Australia*

ABSTRACT

This study describes and analyzes the effect of the Australian government's Travel Warning policy on the level of Australian tourist arrivals in Bali. Travel warning policy is a policy issued by a country to a country in protecting national security for its citizens. Through the Australian government policy it affects the relations of a country and the level of Australian tourist arrivals in Bali. This study uses the human security theory "Human Security" and the theory of bilateral relations through the concept of "Good Neighbor Policy". This study aims to analyze how the influence of the Australian government's Travel warning policy on the level of Australian tourist arrivals in Bali. The research method in this study uses qualitative research methods with secondary data collection sources. The study was conducted through the collection of official documents, journals, newspapers and books with descriptive descriptions. From research data on the effect of the Australian government's Travel warning policy on the level of Australian tourist arrivals in Bali, researchers found that the Travel warning policy is not only a policy in protecting Australian citizens. And then this policy is able to influence the level of Australian tourist arrivals and have an impact on the country of Indonesia, especially in Bali.

Keywords : Travel warning, Australia, Human security, Good Neighbor Policy, Tourist visits

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Australia dan Indonesia merupakan dua negara yang bertetangga secara geografis, namun memiliki banyak perbedaan baik dalam segi sejarah, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam sejarahnya hubungan diplomatik kedua negara ini terkadang bersifat harmonis, namun juga bersifat dinamis. Sejarah mencatat hubungan kedua negara sering mengalami pasang surut terutama jika menyangkut mengenai permasalahan keamanan kedua negara. Seperti yang telah diketahui pada tahun 2002 hingga 2005 terjadi beberapa aksi terorisme di Bali dalam jangka waktu 3 tahun tersebut sangat mempengaruhi hubungan bilateral diplomatik antara Indonesia dengan Australia, terutama mengenai kepercayaan Australia terhadap Indonesia (Haryani, Silvia, 2008 : 4).

Korban jiwa terbanyak dari aksi terror peledakan Bom Bali I dan Bom Bali II berasal dari Australia, yang kemudian terdapat juga dari beberapa negara lainnya yaitu Jepang, Korea, Taiwan, Jerman, Perancis, Italia, Brazil, dan lain – lain. Hal ini semakin memperkuat keyakinan pemerintahan Australia bahwa terorisme di Indonesia dapat menjadi prioritas utama dalam kebijakan pertahanan dan keamanan Negara, hal ini mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan mancanegara terutama warga negara Australia yang berkunjung di Bali (Putra & Hitchcock, 2008 ; 1).

Kunjungan wisatawan warga negara Australia yang bepergian ke Bali dan bagian lain Indonesia. Diperingatkan untuk berhati-hati setelah serangan bom baru-

baru ini di negara itu semakin meningkat, karena memberikan kekhawatiran terhadap pemerintah Australia terhadap warga negaranya. Kebijakan *Travel Warning* Pemerintah Australia di Indonesia memiliki sifat kebijakan peringatan agar terdapat seleksi alam dari warga negaranya yang berkunjung ke Indonesia khususnya di Bali. Peringatan yang diberikan ini bertujuan agar warga negaranya diingatkan sebagai peringatan untuk berhati – hati dalam melakukan perjalanan dan bukan sebagai larangan. (Gita, Andani, 2017 : 12)

Faktor yang mempengaruhi wisatawan mancanegara tetap melakukan kunjungan wisata di bali yaitu pertama, biaya yang murah dalam melakukan perjalanan ; kedua, jarak yang terjangkau dan yang ketiga yaitu menganggap bali sebagai *secondhome* atau rumah kedua bagi wisatawan. Sehingga yang dianggap warga negaranya adalah sebuah keamanan serta resikonya dan akan menjadi sebuah tanggung jawab dari dalam diri sendiri bagi aktor para pelaku yang melakukan kunjungan di Bali. (Gita, Andani, 2017 : 9)

Tabel 1.1 “ Latar Belakang Terjadinya kebijakan Travel Warning pemerintah Australia di Indonesia ”

2002	2003	2005	2015	2017
Bom Bali I , yaitu terjadinya bom di Paddy's Cafe dan Sari	Ledakan bom di hotel JW Marriot, Jakarta	Ledakan Bom Bali II , yang kembali terjadi di 3	Ledakan Bom di Mall Alam Sutera, Tangerang,	Bom Sarinah di Jakarta Timur, serta Kejadian

Club di jalan Legian dan Kuta serta ledakan yang terjadi juga di dekat kantor konsulat jendral Amerika, yaitu di renon , Denpasar, Bali		tempat dalam tragedi tersebut , yaitu di Nyoman Cafe, Manega Cafe, dan Kuta Square.	Banten & tragedi Bali Nine yaitu kasus 2 terpidana mati dari warga negara Australia sebagai gembong Narkotika	Gempa dan Erupsi Gunung Agung di Bali pada bulan September 2017
--	--	--	---	---

(Sumber : antaranews.com oleh PriyambodoRH, 14 Januari 2016)

Travel Warning disampaikan oleh pemerintah suatu negara kepada warga negaranya dilakukan pada saat merespon berbagai perkembangan aktual yang terjadi di negara-negara lainnya. Seperti contoh, *Travel warning* yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat ke Mesir pada tahun 2016 dikarenakan adanya ketidakstabilan keamanan di negara Mesir. Sehingga menyebabkan bentrokan berdarah antara para demonstran pendukung presiden terguling Mohamed Morsi dengan polisi Mesir. (Arsika, 2018 : 26).

Selain itu Amerika juga menerapkan pola kebijakannya tersebut di Thailand. Karena masih terdeteksi adanya kelompok – kelompok Teroris di negara Thailand. (Beshay, Amany N, 2017 : 7).

Kemudian hal lainnya yang menyebabkan dikeluarkannya *Travel warning*, yaitu sebelum malam tahun baru dan natal Perdana Mentri negara Australia Scott Morrison mengeluarkan *Travel warning* kepada warga negaranya yang melakukan perjalanan ke Indonesia terutama di Bali. Karena sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, serta sebagai daerah yang diwaspadai oleh potensi serangan teroris “ (Yoenus, Mohamad, 2018 : 2).

Setelah dikeluarkannya *Travel warning* kepada wistawan Australia yang melakukan perjalanan di Indonesia terutama Bali dalam melindungi dari ancaman. Hal tersebut tidak berpengaruh terhadap minat wisatawan Australia yang melakukan perjalanan di Bali. Dikarenakan masih adanya hubungan kerja sama antar negara yang kuat di bidang lainnya, sehingga masih meningkatkan kunjungan wisata asing ke Indonesia terutama di Bali. (Beshay, Amany N, 2017: 20).

Salah satu bentuk hubungan antar negara tersebut adalah kerjasama intelejen Australia dengan Indonesia dalam menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia. Pada tanggal 21 Desember 2015, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia, Saud Usman Nasuition, menandatangani perjanjian kerjasama dalam pemberantasan terorisme. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat bentuk hubungan bilateral tersebut meningkatkan rasa aman bagi wisatawan mancanegara sehingga dapat membangun hubungan baik Australia dan Indonesia dalam meningkatkan keamanan serta pariwisata antar kedua negara tersebut. (Hanifah, Hana, 2017 : 90 - 91)

Menurut *British Foreign and Commonwealth Office*, Indonesia dinyatakan “ *No restrictions in this travel advice* “ atau dikatakan aman untuk dikunjungi secara keseluruhan. Pernyataan lain dinyatakan oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia yang menempatkan Indonesia dalam kategori “ *exercise a high degree of caution* ” atau melakukan perjalanan dengan tingkat hati-hati yang tinggi” (Aji, Banu Punto, 2012 : 5)

Hal tersebut dibuktikan oleh wisatawan Australia yang melakukan perjalanan masih memiliki perasaan “ aman “ dalam melakukan perjalanan keluar negaranya terutama di Bali. Selain itu bentuk – bentuk kerjasama antara Australia – Indonesia memperkuat keyakinan serta citra positif wisatawan untuk tetap melakukan perjalanan ke Indonesia terutama di Bali. Kemudian harapan di keluarkannya kebijakan *Travel warning* oleh pemerintah Australia kepada warga negaranya, yaitu dapat mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan Australia yang berkunjung ke Indonesia terutama di Bali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan terdapat rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian yaitu mengenai “ Bagaimana pengaruh kebijakan travel warning pemerintah Australia terhadap tingkat kunjungan wisatawan Australia di Bali ? “

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang : Pengaruh kebijakan travel warning pemerintah Australia terhadap tingkat kunjungan wisatawan Australia di Bali.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan dan mengaplikasikan teori serta kajian yang didapat dalam ilmu hubungan internasional, khususnya mengenai teori keamanan manusia *Human Security* yang berhubungan dengan isu – isu keamanan hak dari warga negara atau masyarakatnya sesuai dengan fenomena terwujudnya kebijakan travel warning pemerintah Australia terhadap warga negaranya atau minat kunjungan wisatawan di Bali.

Selain itu memberikan wawasan tentang konsep *Good Neighbor Policy* yang berkaitan dengan Hubungan kerjasama antar negara bertetangga, dalam meningkatkan kepentingan bersama untuk melindungi serta menjaga kesejahteraan warga negaranya terkait kebijakan *Travel warning* Australia terhadap tingkat kunjungan wisatawan Australia di Bali.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan referensi yang berkaitan dengan kebijakan travel warning pemerintah Australia terhadap minat kunjungan wisatawan Australia di Bali. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

c. Bagi Program Studi

Penelitian ini bermanfaat bagi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dalam menambah kajian keilmuan dan mendukung pengembangan ilmu hubungan internasional itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Teori

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk mengkaji pengaruh kebijakan travel warning pemerintah Australia terhadap kunjungan wisata ke Bali. Berikut teori yang penilti gunakan yaitu:

1. Human Security

Human Security berhubungan dengan isu – isu keancaman hak dari warga negara atau masyarakat sebagai contoh seperti halnya isu ekonomi, lingkungan, hingga ke dalam konteks – konteks politik kemudian keamanan ini meliputi pula dalam perlindungan dari gangguan yang tiba – tiba dapat mempengaruhi kehidupan keseharian masyarakat atau warga negara dari sebuah negara, baik itu kehidupan lingkungan di rumah, pekerjaan hingga ke dalam lingkungan sekitarnya. (Oili & Juntunen, 2010 : 17)

Menurut *United Nations Development Program (UNDP)* keamanan manusia menjadi sebuah bentuk perhatian penting akan pentingnya keamanan global yang di generalisasikan menjadi enam output yaitu ;

1. Melindungi manusia dari konflik kejahatan
2. Melindungi dan memberdayakan manusia terkait migrasi akibat konflik / perang atau kejahatan hak asasi manusia

3. Melindungi dan memberdayakan manusia terkait situasi pasca konflik
4. Ketidaksamaan ekonomi terkait dengan pemberantasan kemiskinan, peningkatan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan sosial
5. Menjamin kesehatan untuk keamanan manusia seperti penyebaran penyakit dan ancaman kemiskinan dampak dari konflik
6. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai untuk keamanan manusia; menyediakan sarana pendidikan dasar dan informasi publik terkait ketiga hal tersebut yang relevan dengan bentuk – bentuk kejahatan akibat konflik. (Rizal A. Hidayat, 2017 : 111)

Di masa perkembangannya keamanan manusia dikondisikan oleh kemungkinan munculnya ancaman – ancaman baru yang tidak lagi timbul dari konflik antar negara, melainkan dari munculnya aktor – aktor transnasional yang berkuasa, perusahaan multinasional, Organisasi Internasional, Non-Government, hingga entitas yang bukan dari negara lain. Dengan cara pandang konsep ini terpengaruh dari ancaman yang bersifat global dan keamanan manusia tidak terfokus pada individu dan masyarakat tetapi lebih pada nilai – nilai kemanusiaan yang menjadi sebuah tujuan utamanya, seperti contoh yaitu harga diri manusia, persamaan hak dan solidaritas. Cara pandang ini mengakui

adanya kesamaan hak dan posisi individu sebagai aktor internasional dalam kesatuan hubungan Internasional. Kemudian berkembang sebagai respon terhadap situasi perubahan pada situasi hubungan internasional terutama pada peningkatan saling ketergantungan antar negara. (Muhibin Raihan Ramadhan. 2011 : 1).

Pendekatan keamanan manusia tidak hanya membutuhkan penilaian menyeluruh terhadap kerentanan dan kapasitas masyarakat yang terkena dampak, tetapi juga menuntut penilaian terhadap strategi yang diperlukan untuk membantu mencegah dan mengurangi berulangnya rasa tidak aman. Melalui penilaian ganda inilah bahwa keterkaitan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan strategi dapat diuji secara paling efektif. (United Nations, 2019 : 18)

Human Security, bagaimanapun itu, tidak dimaksudkan untuk menggusur keamanan negara. Sebaliknya, hubungan mereka saling melengkapi tentang keamanan manusia dan keamanan negara yang saling memperkuat dan bergantung satu sama lain. Tanpa keamanan manusia, keamanan negara tidak dapat dicapai dan sebaliknya” (United Nations, 2019 : 12)

Di dalam konsep ini berpengaruh di dalam hubungan keamanan antar negara terutama Australia dan Indonesia. Konsep ini mempengaruhi dalam kebijakan *Travel warning* pemerintah Australia yang diberlakukan kepada warga negaranya dengan tujuan melindungi warga negaranya ketika melakukan kegiatan berpergian atau perjalanan.

Namun dengan demikian kebijakan tersebut kurang disadari oleh warga negaranya, sehingga peningkatan wisatawan dari Australia semakin bertambah untuk berpergian di Bali. (Anonim. 2016 : 1)

Konsep *Human Security* dalam kebijakan *Travel Warning* memiliki pengaruh di dalam pengimplementasiannya pada minat kunjungan wisatawan Australia di Bali yang dinamis. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi hak keamanan manusia dari setiap warga negaranya ketika melakukan perjalanan atau kegiatan wisata di negara lain terutama di Bali. (Hall, C. Michael, 2008 :32 – 35)

2. Konsep Good Neighbor Policy

Suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara yang berdekatan - bertetangga secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi. Hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia salah satunya mengeluarkan kebijakan *Travel Warning* ini bertujuan dalam meningkatkan keamanan serta kesejahteraan warga negaranya dalam meningkatkan efektifitas kegiatan kerjasama ekonomi serta diplomatiknya. Di dalam sebuah teori hubungan bilateral ini pemerintah Australia dengan Indonesia mengkomplekskan hubungannya ke dalam sebuah konsep yaitu “ *Good Neighbor Policy* “. Kemudian dalam sejarahnya, Presiden Roosevelt memberi konsep kebijakan tersebut

pada Maret 1933, ketika ia menyatakan dalam pidato pelantikan pertamanya:

“ Di bidang kebijakan dunia, saya akan mendedikasikan Bangsa ini pada *Good Neighbor Policy* sebagai tetangga yang tegas menghargai dirinya sendiri, karena dia melakukannya, menghormati hak orang lain. Kemudian sebagai tetangga yang menghormati kewajibannya dan menghormati kesucian. perjanjian di dan dengan dunia tetangga. Kami sekarang menyadari karena kami tidak pernah menyadari sebelum saling ketergantungan satu sama lain; yang tidak bisa kita ambil, tetapi harus memberi juga. ”

Konsep ini terletak pada prinsip-prinsip sederhana bahwa negara-negara seharusnya tidak campur tangan dalam urusan negara lain dan bahwa hubungan mereka harus menguntungkan bagi keduanya. (Bryan Blankfield. 2016 : 319)

Kebijakan travel warning di Indonesia berlakunya hanya sebatas peringatan agar ada seleksi dari warga negaranya yang berkunjung ke Indonesia dengan sendirinya serta meningkatkan peran pemerintah Indonesia terhadap kunjungan wisatawan mancanegaranya. Selain itu bentuk kerjasama dari pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia diberlakukannya kebijakan bebas visa 30 hari untuk wisatawan mancanegara terutama warga negara Australia. Kebijakan ini memiliki dampak positif dan negatif yaitu memberikan tingkat kerjasama baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selain hal tersebut faktor lainnya adalah dari kesinambungan bentuk ketergantungan antar kedua negara tersebut menjadi acuan oleh

wisatawan dari Australia sehingga adanya terjadinya tingkat kunjungan wisata yang dinamis. (Shabara Wicaksono. 2016 : 1)

Australia memperluas upaya untuk mendorong pariwisata dua arah antara Australia dan Indonesia sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi bersama. Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson mengatakan Pemerintah Australia mengatakan bahwa pariwisata menggerakkan ekonomi dan memberdayakan masyarakat. (Indonesia.embassy.gov.au, 2017 : 1)

Melalui konsep *Good Neighbor Policy*, pengaruh kebijakan *Travel Warning* pemerintah Australia terhadap minat kunjungan wisatawan mancanegara di Bali dapat teratasi dengan bentuk kerjasama dalam meningkatkan keamanan bagi warga negara antara kedua negara Australia – Indonesia tersebut dalam bentuk penanganan terorisme serta bencana – bencana yang dialaminya, selain meningkatkan keamanan dapat juga membantu dalam kesejahteraan hubungan bilateral ekonomi wisata dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi antar kedua negara serta persepsi positif terhadap warga negaranya.

B. Penelitian terdahulu

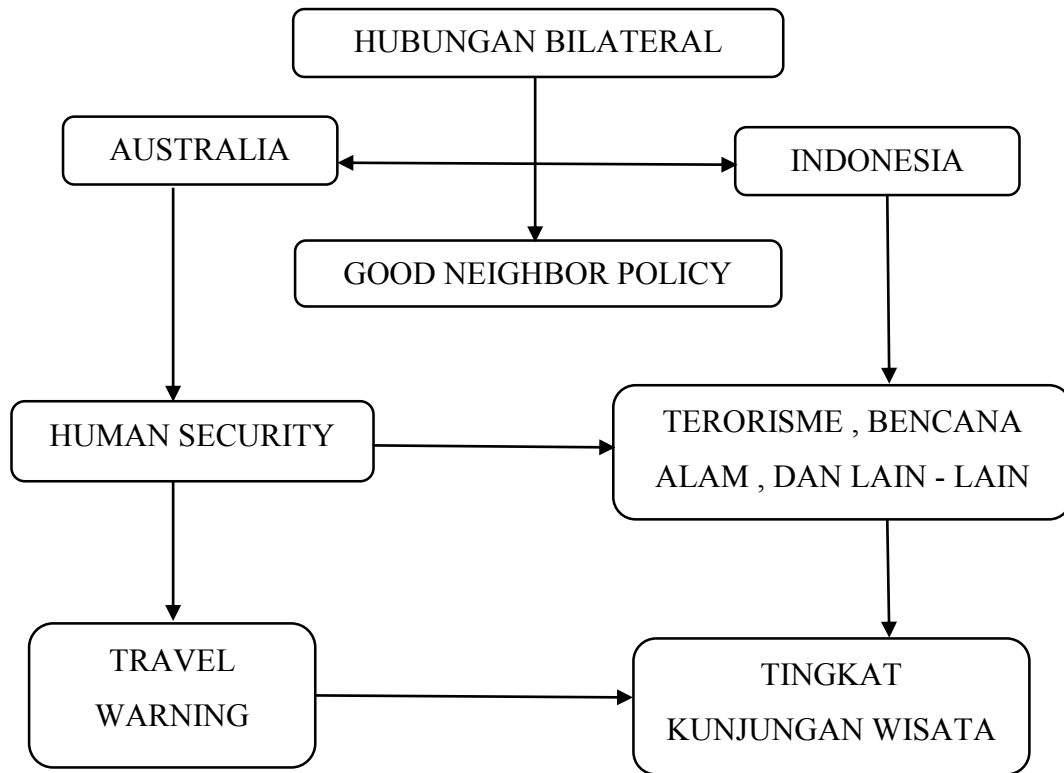
Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai acuan keilmuan yang telah diteliti oleh pihak lain dan menjadi pertimbangan bagi peneliti dan menyusun skripsi ini. Berikut diantaranya :

1. *Terrorism and Travel Warning effects on international tourism* yang berupa jurnal oleh Udo Braendley dan Disna Sajeewani dari *School of Bussiness, American University in Dubai, UAE*. Jurnal ini berisi tentang kasus menyelidiki dampak dari sasaran terorisme dan *Travel Warning* global terhadap minat kunjungan wisata serta jumlah data kedatangan tahunan wisatawan pada periode 2010 – 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban jiwa dari terorism dan kebijakan *Travel Warning* yang diberlakukan secara signifikan mengurangi permintaan pariwisata. Namun, jumlah orang yang luka dan tewas menyebabkan kebijakan *Travel Warning* yang memiliki dampak merugikan pada permintaan pariwisata. Sehingga memberikan kepekaan terhadap karakteristik negara. Jumlah orang yang luka dan tewas disertai kebijakan *Travel Warning* secara signifikan melemahkan permintaan pariwisata untuk negara-negara berkembang tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan di negara-negara maju. (Braendley & Disna Sajeewani, 2017 : 992)
2. *Kebijakan Travel Warning dan Pembatasan Hak Berwisata* ditulis oleh I Made Budi Arsika, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati dari Universitas Udayana, Bali, Indonesia, 2018. Jurnal ini berisi tentang dikeluarkannya kebijakan *Travel Warning* oleh suatu negara berdampak pada tingkat kunjungan wisata ke negara yang dituju. Kebijakan *Travel Warning* merupakan implementasi dari kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya yang berpengaruh dalam

keamanan manusia atau *Human Security* ketika mereka berada di luar negeri atau negara lain serta sekaligus merefleksikan tindakan negara untuk menjamin terpenuhinya hak – hak dari warga negaranya. (Arsika, Jaya, & Satyawati, 2018 : 27)

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan, kebijakan *Travel Warning* menjadi salah satu bentuk strategi politik serta implementasi sebuah negara dalam melindungi warga negaranya. Kemudian faktor – faktor yang mempengaruhi di berlakukannya kebijakan *Travel Warning* adalah lemahnya keamanan negara seperti contoh bentuk Terorisme yang menjadi sebuah faktor utama sensitif di seluruh dunia. Sehingga berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan baik interlokal maupun mancanegara ke negara yang dituju. Dari kedua penelitian tersebut melatarbelakangi peneliti untuk membuat penelitian ini yang lebih memfokuskan pada pengaruh kebijakan *Travel warning* yang dilakukan oleh Australia terhadap tingkat kunjungan wisatawan mancanegara di Bali, Indonesia. Melalui kebijakan *Travel Warning* menciptakan keamanan bagi warga negaranya dan membantu introspeksi sebuah negara dalam meningkatkan keamanan yang dimiliki terhadap tingkat kunjungan wisatawan mancanegara di Bali.

C. Kerangka Berpikir



Dengan adanya latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti akan menjabarkan kerangka berfikir yang digunakan oleh peneliti, yaitu hubungan bilateral antara Australia dengan Indonesia menggunakan konsep *Good Neighbor Policy* sebagai salah satu instrumen atau alat dalam menjaga hubungan yang baik bertetangga agar mencapai kepentingan hubungan internasional. Melihat Indonesia memiliki faktor – faktor ancaman bagi Australia terutama warga negaranya. Maka dalam melindungi warga negaranya, pemerintah Australia mengimplementasikan keamanan sebuah negara yaitu keamanan manusia *Human Security*. Faktor – faktor yang mempengaruhi ancaman tersebut antara lain aksi Terorisme, aksi – aksi anarki atau kerusuhan

di setiap wilayah, bencana alam, dan lain – lain. Hal tersebut memicu pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan *Travel Warning* dalam melindungi warga negaranya yang melakukan perjalanan ke Indonesia terutama di Bali. Selain itu tujuan kebijakan *Travel warning* yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia dapat mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia terutama di Bali, untuk mengingatkan kondisi yang terjadi di wilayah tersebut. Kemudian dalam implementasinya melalui konsep *Good Neighbor Policy* pemerintah Australia menciptakan hubungan yang baik kepada Indonesia dalam hal saling menjaga keamanan negara terutama dalam keamanan untuk warga negaranya. Hal itu diwujudkan dalam bentuk kerjasama pemberantasan Terorisme yang ada di wilayah Indonesia yang di terapkan Australia kepada kedua negara tersebut. Sehingga dapat mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung di Indonesia terutama Bali, sehingga para wisatawan memiliki rasa aman ketika melakukan perjalanan ke Indonesia yaitu di Bali.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut Moleong, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. (Herdiansyah, Haris, 2010 : 9). Sejalan dengan definisi tersebut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dari peristilahannya.

Dari definisi tersebut Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dan dengan pola deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moeleong, Lexy J., 2012 : 4 – 15). Dalam metode penelitian pola deskriptif itu menggambarkan bahwa data tersebut berupa teks yang menghubungkan antar fenomena (Mamik. 2015 : 16). Kemudian dalam buku berjudul metode penelitian hubungan internasional yang ditulis oleh Umar Suryadi Bakrie mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna (*meaning*) yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial dan

kemanusiaan (Bakrie, 2016 : 14). Maka sebab itu peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dalam tujuan untuk mendiskripsikan serta menganalisis pengaruh *Travel Warning* pemerintah Australia terhadap tingkat kunjungan wisatawan Australia yang berkunjung di Bali. Dan dalam penulisan ini peneliti tidak melakukan pencarian data melalui wawancara dengan orang atau pihak tertentu, maupun informasi yang didapat sebagai data pendukung melalui jurnal, ciri – ciri analisa, dan latar belakang.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Dimana sumber data berasal dari buku – buku teori hubungan internasional dalam travel warning, majalah smartraveler, dokumen – dokumen seperti jurnal, surat kabar, dokumen resmi dan sumber internet yang berisi tentang bagaimana kebijakan tentang *Travel Warning* dan perkembangan tingkat kunjungan wisatawan Australia di Bali untuk mendukung dalam penelitian yang diangkat oleh peneliti, baik di dalam data internet tersebut juga terdapat buku elektronik dan jurnal elektronik serta dokumen-dokumen elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan peneliti menggunakan data sekunder adalah untuk menggunakan dan memanfaatkan data hasil penelitian terdahulu, buku, majalah, dokumen, dan internet untuk memperoleh hasil penelitian yang baru.

C. Obyek penelitian

Agar peneliti bisa lebih fokus dalam membahas pokok masalah maka penulis menitikberatkan untuk menganalisis pengaruh kebijakan *Travel Warning* terhadap

tingkat kunjungan wisatawan Australia di Bali. Alasan peneliti karena *Travel Warning* adalah bentuk kebijakan di dalam sebuah pemberitahuan resmi terhadap publik yang berfungsi untuk memperingatkan publik maupun para wisatawan yang melakukan perjalanan terhadap ancaman bahaya yang ada di negara tersebut, selain itu menjadi sebuah strategi dari konsep negara yang bertetangga baik di dalam hubungan internasional antar negara. (Lo''wenheim, Oded. 2007 : 203 – 221)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah menggunakan studi dokumentasi. Yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan kepada dokumen-dokumen tertentu yang berhubungan dengan pengaruh kebijakan *Travel Warning* dan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara. Dokumen tersebut dapat berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen resmi antara Australia dan Indonsia dalam hal *Travel Warning, International Tourism* atau majalah yang menunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis deskriptif yaitu penulis menggunakan 3 analisis data yaitu :

1. Reduksi Data

Teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, peneliti mengumpulkan data tentang pengaruh kebijakan *Travel Warning* terhadap tingkat kunjungan wisatawan Australia di Bali yang diperoleh melalui dari sumber referensi buku, majalah, jurnal, laporan surat – surat resmi, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain kemudian penulis memilah data yang difokuskan dengan maksud supaya penelitian ini agar lebih mudah untuk dipahami.

2. Penyajian Data

Dalam Analisis pada data kualitatif, dalam penyajian data penelitian peneliti menggunakan uraian singkat serta teks yang bersifat naratif untuk menggambarkan analisa data tentang pengaruh kebijakan *Travel Warning* terhadap tingkat kunjungan wisatawan Australia di Bali yang telah didapat oleh peneliti.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data yang peneliti lakukan dalam penelitian tentang pengaruh kebijakan *Travel Warning* terhadap tingkat kunjungan wisatawan Australia di Bali ialah mengumpulkan, memilah, dan menarik kesimpulan dari data sekunder sehingga data penelitian yang peneliti lakukan akan menjadi data valid dan kredibel.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran penting hubungan Negara Indonesia bagi Australia

Dalam perkembangannya, hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia mengalami pasang surut. Hal tersebut terjadi karena berbagai perbedaan yang ada di antara kedua negara, antara lain, perbedaan yang terkait dengan sistem politik, kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Namun, fakta geografis yang menunjukkan bahwa kedua negara merupakan negara bertetangga menjadi faktor yang mendorong perlunya kedua negara untuk berinteraksi secara kondusif guna menjaga stabilitas kawasan. Pada tahun 2005 hubungan Australia dan Indonesia diperkuat oleh “ *Joint Declaration on Comprehensive Partnership Between Australia and The Republic of Indonesia* ” yang berisikan tentang kerjasama ekonomi, keamanan, interaksi antar warga negara, serta kenegaraannya. Kemudian pada tahun 2010 diterbitkan “ *Indonesian – Australia Joint Statement Jakarta* ” yang berisikan terkait kerjasama pembangunan antar negara didalam kegiatan “ *Indonesia – Australia Ministerial Forum* ” (IAMF) pada tanggal 2 November 2010. Di dalam forum tersebut menghasilkan hubungan kerjasama Australia dan Indonesia, di berbagai bidang yaitu ;

1. Bidang Ekonomi dan Perdagangan

Pada bulan November 2010, diluncurkan “ *Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* “ yang berisikan tentang peningkatan perdagangan produk – produk berpotensi antar negara seperti furnitur, tekstil, alat komunikasi, obat – obatan, permesinan dan peralatan elektronik. (dfat.gov.au, 2010)

2. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Peningkatan pertukaran pelajar antar negara dengan meningkatkan peran *Australia – Indonesia Institute* (AII) sebagai lembaga peningkatan sumber daya manusia di dalam tingkat pelajar terkait ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan dan menerapkan kunjungan ke Indonesia setiap musim semi. Kemudian di dalam meningkatkan kesehatannya Australia memberikan peran penting terhadap Griffith University dan Sydney University di bidang *Master of International Public Health* (MIPH) dengan dukungan *Consumer Health Forum and The Australian Commission on Safety and Quality in Healthcare* dalam menangani kasus HIV/AIDS dan penanggulangan penyakit mata di Indonesia, khususnya di Bali. (Indonesia.embassy.gov.au, 2011)

3. Bidang Keamanan

Pada 3 Maret 2009, Australia memperkuat kerjasama dengan Indonesia dalam keamanan perbatasan terkait menangani masalah warga – warga yang terlantar, pencari suaka dan penyelundupan manusia melalui kegiatan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). (Indonesia.embassy.gov.au, 2009)

4. Bidang Pariwisata

Dalam meningkatkan pariwisata antar negara pada 5 – 7 april 2017 diadakan *Australia – Indonesia Transportation Forum* di Bali, yang berisikan tentang hubungan kerjasama antar negara dalam membuka akses di bidang transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan sektor pariwisata antar negara tersebut. (Anonim. 2017)

Melihat hal tersebut sebuah kesinambungan antara pemerintah Australia dengan Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjalin hubungan kedua negara tersebut. Selain itu mengingat kedua negara tersebut selalu menghadapi permasalahan dan tantangan bersama yang mempengaruhi keamanan kedua negara.. Maka kedua negara tersebut melakukan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas dan keamanan. Tetapi permasalahan yang selalu dihadapi Australia dari Indonesia menimbulkan berbagai ancaman dalam keamanan negaranya.

B. Ancaman Indonesia bagi Australia

1. Peristiwa 9/11

Pada 11 September 2001, dua situs penting di Amerika Serikat yaitu Pentagon dan World Trade Center (WTC) diserang oleh kelompok yang disebut sebagai Teroris. Peristiwa di World Trade Center mengakibatkan 2.753 orang yang tewas ketika pesawat American Airlines Flight 11 dan United Airlines Flight 175 menabrak menara utara dan menara selatan WTC. Sebagian besar korban merupakan penumpang pesawat termasuk para pembajak dan para pegawai bangunan serta pengunjung WTC. Selain itu terdapat juga 343 orang pemadam kebakaran Kota New York, 23 orang lainnya adalah polisi Kota New York, dan 37 lainnya adalah petugas di Otoritas Pelabuhan. Para korban berusia berkisar dua sampai 85 tahun. Sekitar 75 - 80 persen korban adalah laki-laki. Sementara di Pentagon, Washington, 184 orang tewas ketika American Airlines Flight 77 yang dibajak, menabrak gedung Departemen Pertahanan AS itu. Di Pennsylvania, 40 penumpang dan awak kapal United Airlines Flight 93 tewas saat pesawat jatuh di sebuah lapangan (Manan, Abdul. 2013).

Peristiwa ini dengan cepat ditanggapi oleh Amerika Serikat dengan menyatakan perang terhadap teroris yang diklaim sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas peristiwa 9/11. Dampak dari hal tersebut adalah muncul suatu kesadaran akan “*War On Terror*” yang seketika menjadi kata kunci dalam memerangi teroris untuk meningkatkan keamanan

internasional terutama terhadap keamanan manusia (*Human Security*) warga negaranya. Didalam teori tersebut memiliki arti dari hak manusia atau warga negara yang dilindungi oleh kewajiban sebuah negara dalam melindungi warga negaranya, hal tersebut meliputi dari ancaman bahaya, pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan permasalahan pada umumnya. (Harini & Haqqi, 2018 : 8).

Kemudian dalam kesadaran “War On Teror” dibuktikan dengan serangan Amerika terhadap Afghanistan sebagai negara berpenduduk Islam dan hal tersebut menimbulkan pandangan Internasional bahwa terorisme adalah Islam. Di sisi lain, negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim terutama menjadi “kambing hitam” bagi negara-negara barat karena pelakunya yang merupakan kelompok Al-Qaeda, dan juga mereka adalah muslim. (Hardiana. 2008 : 2 – 3).

Hal tersebut membuat Indonesia juga mengalami imbasnya yang dicap sebagai negara terorisme karena selain merupakan negara Muslim terbesar, Indonesia juga belum memiliki undang – undang atau pernyataan dalam keamanan memberantas terorisme dan dianggap sebagai ‘ancaman’ Negara Barat seperti Amerika Serikat. Bersamaan dengan peristiwa 9/11 pada 11 September 2001, Indonesia diminta Pemerintah Amerika Serikat untuk menanggulangi terorisme, mengingat terjadinya tragedi bom seperti pada Kedutaan Besar Filipina di Jakarta tahun 2000, kemudian bom malam natal 24 Desember 2000 di Gereja Eben Hezer,

Mojokerto, dan pada bulan April terjadi pengebomban di Masjid Istiqlal. Namun Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri tidak ada pernyataan secara jelas terhadap sikap mereka dalam “*War On Terror*” seperti yang diinginkan Amerika Serikat. Hal tersebut menimbulkan kekecewaan bagi Amerika Serikat kepada Indonesia yang diandalkan menjadi teman kerja untuk Amerika Serikat. (Putra & Hitchcock, 2008 : 86 - 88).

Peristiwa 9/11 adalah momen yang tepat untuk Amerika sebagai negara adidaya menyebarkan pada dunia tentang bahaya teroris yang awalnya merupakan masalah global. Eratnya hubungan Australia dengan Amerika terutama dalam hal militer, adalah hubungan yang lebih penting bagi Australia. Kemudian hubungan dengan Asia dianggap ancaman serta integrasi regional Australia dengan negara-negara sekitarnya. (Janatin, Umul, 2017 : 23 - 24)

Hal tersebut menimbulkan pandangan Australia untuk mengantisipasi terorisme serta melindungi keamanan warga negaranya. Melihat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Islam, dengan segera dalam melawan terorisme terbentuknya kerjasama antara Australia – Indonesia untuk memerangi terorisme global dalam bentuk *Memorandum of Understanding Combating International Terrorism* yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hubungan Sosial, Budaya, dan Penerangan Departemen Luar Negeri Abdurrachman Mattaliti mewakili RI dan Duta

Besar Australia untuk Indonesia Richard Smith, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2002.(Aji, Banu Punto. 2012 : 2).

Kemudian setelah dibuat MOU tersebut aksi terorisme muncul di Indonesia terutama di Bali, dalam memerangi segala bentuk terorisme tersebut. Australia sebagai negara tetangga Indonesia tidak hanya diam, tetapi menerapkannya pada kasus Bom Bali melalui perjanjian tersebut. Bertujuan dalam melindungi warga negaranya yang sedang melakukan perjalanan di Indonesia terutama Bali.

2. Serangan Bom Bali I

Serangan bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 (tepatnya di Paddy's Café dan Sari Club). Selang antara satu tahun tersebut setelah kejadian Bom bali terjadi ledakan bom di Hotel JW Marriot tahun 2003, dan kemudian disusul pada tahun berikutnya di Kedutaan Besar Australia pada tahun 2004.(Tribunnews.com, 2010).

Setelah peristiwa Bom Bali I, maka tindak lanjut sekaligus reaksi pemerintah Australia terhadap berbagai ancaman yang mereka rasakan, dan dari berbagai serangan teror di Indonesia. Maka pemerintah Australia keluaran kebijakan reaktif yaitu *Travel warning* terhadap warga negaranya yang melakukan perjalanan di Indonesia terutama Bali. Melalui kebijakan pemerintah Australia yaitu *Travel Warning*, dan cenderung menunjukkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah Indonesia, khususnya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan warga negara lain

yang berada di wilayah kedaulatannya. Berangkat dari rasa ketidakpercayaan itu, maka wajarlah jika kemudian Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan peringatan berkunjung “ *Travel Warning* “ ke Indonesia terhadap warga negaranya. Tindakan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia tersebut tanpa memperhatikan pertimbangan bahwa Indonesia sangat dibutuhkan oleh Australia, khususnya dalam kepentingan hubungan negara bertetangga. (Hanifah, Hana. 2017 : 15).

Secara umum, *Travel Warning* atau larangan berkunjung adalah himbauan untuk tidak pergi atau melakukan perjalanan ke suatu negara yang di anggap tidak aman. Hal tersebut di keluarkan pemerintah suatu negara untuk melindungi warganya dari ancaman yang sedang terjadi di negara yang di berikan kebijakan tersebut tersebut. Kemudian menurut definisi Macmillan Dictionary, pengertian *Travel Warning* adalah sebagai berikut :

“ *an official notice in which a government warns its citizens not to travel to a particular country or region because it is dangerous* ”.

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah pernyataan resmi sebuah pemerintah memperingatkan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke suatu negara atau wilayah tertentu karena berbahaya. (Arsika, 2018.: 27)

3. Serangan Bom Bali II

Kemudian pada tahun 2009, terjadi ledakan bom di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot yang membuat Australia kembali memberlakukan *Travel Warning* kepada Indonesia. Dan memberlakukan level peringatan larangan berkunjung ke seluruh bagian negara Indonesia terhadap warga negaranya. Setelah kejadian tersebut dua bulan setelahnya teroris yang paling dicari Noordin M. Top tewas dalam penggerebekan di wilayah Solo, Jawa Tengah. Namun itu tidak serta-merta membuat Australia mencabut kebijakan *Travel Warning*, dan hanya diturunkan ke level yang cukup rendah. (Anonim, 2010)

Setelah kejadian tersebut pemerintah Australia di masa pemerintahannya bekerja sama dengan *Departement of Foreign Affairs & Trade (DFAT)* dan *National Threat Assessment Centre (NTAC)*. Melalui lembaga ini pemerintahan Australia dapat memberikan pemberitahuan dan saran keamanan perjalanan di negara tujuan bagi warga negara Australia yang sedang melakukan perjalanan maupun menetap di negara lain. Pemberitahuan ini diterbitkan pada website dan surat kabar *smarttraveller.gov.au*, sehingga dapat diakses langsung oleh warga negara Australia. (Lo'wenheim, Oded, 2007 : 206).

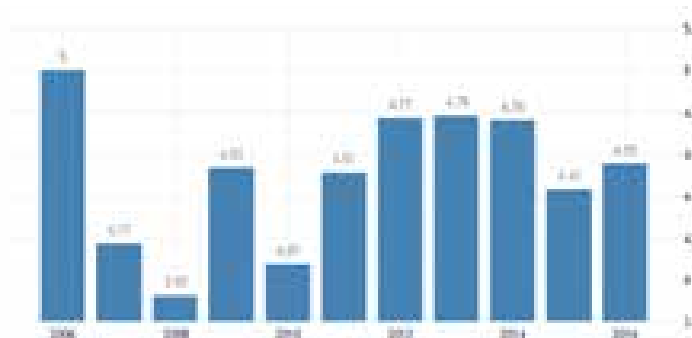
Pernyataan tersebut dinyatakan oleh *Departement of Foreign Affairs & Trade (DFAT)* yang menempatkan Indonesia dalam kategori “ *exercise a high degree of caution* ” atau “ melakukan perjalanan dengan tingkat

hati – hati yang tinggi ” untuk Indonesia secara keseluruhan. Ada juga kebijakan tersebut dengan pernyataan “ *reconsider your need to travel* ” atau “ pertimbangkan kembali perjalanan anda “ untuk wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi Tengah, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Setelah peristiwa tersebut negara – negara tetangga memberikan bantuan ke Indonesia. Diantaranya bahkan menjalin hubungan kerjasama dalam pemberantasan terorisme, termasuk Australia. Kemudian pasca kejadian tersebut Australia dan Indonesia sepakat mendirikan “ *Joint Investigation and Intelligence Team to Investigate the Bali Bombing* “. Kegiatan tersebut bertujuan menyelesaikan kasus pengeboman serta penangkapan terorisme di Indonesia terutama Bali (Downer, 2014 : 1).

Selain itu masih terdapat macam – macam ancaman bahaya terorisme di Indonesia yang mempengaruhi pemerintah Australia terhadap keamanan atau dalam melindungi warga negaranya. Ancaman bahaya terorisme tersebut digambarkan melalui grafik di bawah berikut ;

Grafik 1.1 “ Indeks Terorisme di Indonesia “



(Sumber : id.tradingeconomics.com/indonesia/terrorism_index, diakses pada 10

Juni 2017)

Setelah tahun 2006 aktivitas atau aksi terorisme cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2008. Hal tersebut berkat bentuk kerjasama keamanan negara oleh Australia dan Indonesia. Tetapi bentuk intimidasi yang mengarah ke ancaman-ancaman masih berlangsung, yang berujung pada tahun 2009 sekelompok teroris meledakan bom di hotel JW Marriot, Jakarta dan Bali untuk kedua kalinya.

Kemudian menuju ke tahun 2010 penangkapan besar – besaran oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dalam catatan akhir tahun penegakkan hukum dalam kasus teroris menjelaskan, Polri khususnya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri serta Badan Intelejen Negara, telah menangani 36 kasus berkaitan dengan terorisme sepanjang 2010, Setelah itu muncul 14 kasus teroris di seluruh wilayah Indonesia hingga tahun 2012. Dalam proses penyidikannya tercatat ada 78 orang tersangka, dan 10 orang diantaranya tewas saat proses penangkapan. (Waluyo, Andilala, 2012).

Pada tahun 2014 aktivitas terorisme cenderung menurun, tetapi intimidasi yang mengarah ke ancaman-ancaman kelompok radikal masih berlangsung. Seperti contoh kelompok yang terus melakukan gangguan adalah kelompok Mujahiddin Indonesia Barat (MIB) dan Mujahiddin Indonesia Timur (MIT). Walaupun demikian, Indonesia juga tetap siaga mengenai adanya pergerakan kelompok radikal ISIS yang menjadi sorotan utama di tahun 2014. Salah satu teror yang dilakukan kelompok tersebut

adalah dengan melakukan pembaiatan pendukung ISIS di Gedung Syahida Inn pada tanggal 6 Juli 2014 (Anonim. 2014).

Aktivitas terorisme tahun 2015 cenderung menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Badan Intelijen Negara melakukan upaya penangkapan terduga di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Para terduga terorisme tersebut telah menyiapkan aksi teror dengan nama sandi “ konser akhir tahun ”. Sedikitnya enam orang telah ditangkap, diketahui bahwa mereka merupakan kelompok jaringan Abu Jundi. Tetapi hal tersebut juga bersamaan dengan peledakan bom di Mall Alam Sutera, Tangerang pada 28 Oktober 2015 dan juga tragedi Bali Nine yaitu kasus 2 terpidana mati dari warga negara Australia sebagai gembong narkoba. (Anonim, 2015).

Pada tahun awal 2016 terjadinya peledakan bom di Jakarta yang tepatnya dikenal sebagai Bom Sarinah pada 14 Januari 2016, setelah itu pada 5 Juli 2016, Nur Rohman, seorang pengebom bunuh diri yang memiliki relasi dengan Organisasi Islam radikal yaitu Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) dan berubah menjadi Jamaah Ansharut Daulah (JAD), menyerang kantor polisi di Solo, Jawa Tengah, yang menewaskan dirinya serta melukai petugas polisi. (Abdullah, Asman, 2018 : 218 – 220)

Serangan ini terjadi di hari terakhir bulan suci Ramadan, dilanjutkan pada 27 Agustus 2016, seorang pelaku berusia 17 tahun menyerang pastor Katolik menggunakan pisau yang menyebabkan luka

ringan, setelah gagal meledakkan sebuah gereja di Medan, Sumatra Utara. Kemudian 20 Oktober 2016, Sultan Azianzah menyerang tiga orang polisi dengan pisau, menyebabkan satu orang luka parah di Tangerang, Banten. Dan tragedi terakhir pengeboman di tahun 2016 yaitu mantan tahanan teroris Johanda melemparkan bom molotov ke gereja Oikumene di Sengkotek, Samarinda, Kalimantan Timur, yang menyebabkan empat anak luka parah serta merusak sejumlah sepeda motor, pada tanggal 13 November 2016. (Smartraveller.com, 2017).

4. Bencana Alam

Di dalam sejarahnya, Bali dikenal sering dengan bencana gempa hingga tsunami yang dialaminya. Pada tahun 1917 terjadi gempa berukuran 6,5 SR dan memicu terjadinya tsunami, kejadian tersebut menelan korban hingga 15.000 orang tewas akibat kejadian tersebut. Selanjutnya pada tahun 1976 sebuah gempa berukuran 6,6 SR hingga memicu tsunami yang menimbulkan sekitar 553 korban tewas di daerah Tabanan, Jembrana, Buleleng, dan 4000 korban luka – luka akan bencana tersebut.(Antony, Nouval, 2019)

Berjalannya waktu, gempa tersebut muncul kembali pada tahun 2011 pada bulan Oktober. Gempa dengan ukuran 6,8 Skala Richter berpusat dari jarak 143km arah barat daya Nusa Dua, Bali. Hal tersebut juga dirasakan oleh wilayah lainnya, yaitu Mataram, Malang, Banyuwangi, Jember, hingga Yogyakarta. Kejadian tersebut menimbulkan

kerusakan pada bangunan terutama hotel – hotel serta sekitar 50 warga negara lokal dan asing mengalami luka – luka. (Anonim, 2011)

Kemudian di tahun 2012, pada bulan Maret, wilayah Jembrana, Bali dilanda banjir bandang setinggi $\frac{1}{4}$ meter dan menimbulkan jembatan di kecamatan Melaya, Jembrana hancur. Jembatan tersebut menghubungkan antar desa di Jembrana serta beberapa warga tergenang oleh banjir tersebut. (Jaya, Gede, 2012). Dan lanjut di tahun 2017, pada bulan November Bali dilanda bencana Longsor di wilayah Kintamani. Kejadian tersebut menimbulkan 12 warga lokal meninggal dunia dan 4 warga negara asing luka – luka. (Suriyani, Luh De, 2017). Kemudian dilanjut pada bulan Desember 2017 erupsi Gunung Agung di Bali, status gunung Agung berada di skala Siaga yang menimbulkan gempa tektonik yang kuat serta letusan asap tebal 2.500 meter. Hal tersebut menimbulkan aktifitas penerbangan dari Bali ke Australia dihentikan, selain itu aktifitas gempa yang terjadi terus menerus menimbulkan issue ke bencana yang menyebabkan Tsunami besar di Bali (Bhaskara, 2017 : 32 – 33)

Dalam peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran pemerintah Australia terhadap 73.000 warga negaranya yang melakukan kunjungan di Bali sehingga terjebak pada suasana menegangkan, sehingga pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan “*Travel Warning*” kepada Indonesia agar seluruh warga negara Australia dapat mengungsi selama peristiwa

tersebut dan menghubungi atau meminta bantuan terhadap biro setempat.

(Umarul, Faruq, 2017)

Berdasarkan ancaman – ancaman bahaya tersebut, terlihat Indonesia belum sanggup dalam menangani warga negaranya maupun warga negara asing yang berkunjung dari berbagai ancaman bahaya yang terjadi. Hal tersebut mempengaruhi dalam melindungi keamanan manusia pemerintah Australia yaitu warga negaranya yang berkunjung ke Indonesia terutama Bali. Sehingga melalui kebijakan pemerintah Australia dengan mengeluarkan “*Travel Warning*”. Bertujuan dalam memperingatkan warga negaranya untuk selalu berhati – hati serta menjaga diri ketika sedang maupun dalam melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

C. Kebijakan *Travel Warning* Masa Pemerintahan Australia

1. PM Kevin Rudd (2007 – 2012 & 2013)

Di dalam pemerintahan PM Kevin Rudd menggantikan pemerintahan PM John Howard, memandang keamanan pemerintahan di Indonesia terutama masalah teroris di Indonesia. Bagi Pemerintahan Kevin Rudd, Indonesia tetaplah sebuah negara yang tidak aman, serta masih dianggap ancaman dalam melindungi warga negaranya untuk secara bebas dikunjungi, meskipun Indonesia mendapat pengakuan dunia, sukses dalam menumpas jaringan terorisme pada tahun tersebut. *Departement of Foreign Affairs and Trade (DFAT)* Australia tetap mengelompokkan Indonesia ke dalam daftar negara – negara dunia yang sangat diwaspadai oleh warga negara Australia sebelum

memutuskan untuk berkunjung atau berpergian. (Wiyatiningrum, Dwi A., 2015 : 80 – 82)

Pada masa pemerintahan PM Kevin Rudd, melalui National Threat Assessment Centre (NTAC) sebagai badan pusat penelitian ancaman nasional Australia masih terus menerima laporan – laporan yang mengindikasikan adanya rencana serangan terorisme pada tempat – tempat yang ramai dikunjungi wisatawan asing terutama di Bali. Kemudian skala *Travel Warning* yang diberlakukan pada masa pemerintahan Kevin Rudd dan DFAT dalam melakukan perjalanan, yaitu pada skala atau level 3 – *Reconsider you need to travel* berada satu level di bawah level 4 – *Do Not Travel*. Maksud di balik peringatan perjalanan level 3 tersebut adalah harus benar – benar mempertimbangkan kewaspadaan diri dalam melakukan perjalanan, dalam keamanan perjalanan terutama dari ancaman – ancaman terorisme. (theaustralia.com, 2017)

Berdasarkan pada masa pemerintahan PM Kevin Rudd melihat kondisi di pemerintahan Indonesia sangatlah tidak aman dikarenakan pada masa pemerintahannya bersamaan dengan kasus – kasus pengeboman di Indonesia yang sangatlah banyak sehingga menimbulkan rasa ketakutan atas keamanan regional serta warga negara yang berkunjung ke Indonesia.

2. PM Julia Gillard (2010 – 2012)

Di masa pemerintahan Julia Gillard, kawasan asia – pasifik mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut diakibatkan oleh integrasi hubungan ekonomi intra Asia – Pasifik yang berlangsung melalui mekanisme pasar maupun wadah kerjasama formal yaitu *ASEAN Regional Forum (AFR)*, *Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)*, dan *Assosiation of South East Asian Nation*, kemudian kawasan Asia – Pasifik menjadi kawasan pasar baru di negara – negara industri maju. (Wuladari, Putu Ayu 2014 : 14)

Hal tersebut di buktikan oleh Australia dalam buku “ *White Paper*” yang di terbitkan pada 28 Oktober 2012 berjudul “ *Australia In The Asian Century* “. Sekaligus Perdana Menteri Julia Gillard juga mengatakan dalam pidatonya bahwa :

“ Pada abad ini, kawasan Asia akan menjadi tempat kediaman untuk sebagian besar kelas menengah dunia dan akan menjadi penghasil barang serta jasa terbesar di dunia, dan menjadi konsumen terbesar. Skala dan pesatnya kemajuan Asia sungguh menakjubkan, sehingga menghadirkan peluang dan tantangan yang signifikan bagi seluruh warga Australia. Hubungan diplomatik Australia dengan negara – negara utama di kawasan Cina, India, Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan menjadi semakin komperhensif. “ (anonim. 2012)

Di pidato tersebut menjelaskan bahwa, kebijakan luar negeri pemerintahan Julia Gillard meningkatkan kerjasama nya ke arah Asia

termasuk Indonesia. Tetapi di sudut pandang Julia Gillard terhadap keamanan Indonesia masih dianggap menjadi ancaman bagi negara Australia dan warga negaranya, oleh karena itu masih diberlakukannya *Travel Warning*.(Wuladari, Putu Ayu 2014 : 16 - 17). Pada akhir masa pemerintahannya, DFAT mengeluarkan *Travel Warning* bagi warga negaranya yang hendak dan sedang melakukan perjalanan di Bali, skala atau level *Travel Warning* diberlakukan di level 3 “ *Reconsider your need to travel* “, karena tingginya ancaman serangan teroris. Meskipun pemerintahan Australia, Julia Gillard mengapresiasi kepolisian indonesia dalam menangkap para pelaku teroris, tetapi kekhawatiran yang dianggap mengancam belum hilang dari sudut pandang Australia.(Anonim. 2011).

Melihat pada masa pemerintahan PM Julia Gillard terjadinya kerjasama yang diterapkan pemerintah Australia dengan Indonesia yaitu membantu dalam penangkapan terhadap kasus tersangka pengembomam di Indonesia. Kemudian melalui sikap PM Julia Gillard yang mengapresiasi berhasilnya penangkapan kasus tersangka pengeboman tersebut tidak menutup kemungkinan Australia mencabut kebijakan *Travel Warningnya* dikarenakan pada masa pemerintahannya masih memiliki rasa waspada terkait faktor lain yang menimbulkan bahaya pada warga negaranya.

3. PM Tony Abbot (2013 – 2015)

Pada masa pemerintahan Tony Abbot di tahun 2013 pada masa pemerintahan Tony Abbot mulai mengalami ketegangan tentang keamanan bagi negara dan warga negara Australia, di tahun itu pemerintah Australia kerap mengeluarkan *Travel Warning* kepada Indonesia merupakan respon terhadap peningkatan aksi protes pada 23 November 2013 terkait penyadapan yang telah dilakukan oleh badan intelijen Australia terhadap Indonesia. Selain pemerintah Indonesia, beberapa rakyat Indonesia saat itu juga menunjukkan respon yang cukup keras dengan cara meretas laman internet Australia. Salah satu rakyat Indonesia yang tergabung dalam sekelompok *hacker* ini menggunakan identitas *Anonymous Indonesia* dan telah meretas lebih dari 100 laman internet Australia.(Fathkul, Sukirno. 2013 : 1)

Kemudian dalam kehadiran PM Tony Abbott pada saat pelantikan Presiden Jokowi, Indonesia berharap bahwa Australia memperbaiki hubungan bilateral dengan Indonesia dengan menekan konsep “*people to people* “ yang memiliki arti mengembangkan fondasi hubungan bilateral yang dibangun dengan asas pertemanan, baik pada level pemerintahan maupun masyarakat. (Dugis, Vinsensio. 2009. No. 2 : 311)

Tetapi hal tersebut tidak merubah sikapnya untuk menarik kembali *Travel Warning* terhadap Indonesia, dikarenakan terjadinya

kasus “ *Bali Nine* “, yaitu dua terpidana warga negara Australia atas kepemilikan narkoba berjenis heroin dengan berat 8,2 kg senilai \$ 4 Miliar dollar , bernama Andrew Chan dan Myuran Sukumaran divonis hukuman mati pada tahun 2015 yang sangat bergejolak. Vonis hukuman mati tersebut menimbulkan kontroversi antara negara Australia dan Indonesia bahwa, penjatuhan hukuman mati kepada warga negaranya dinilai tidak adil dan tidak berkemanusiaan. Kemudian pula isu mengenai kesehatan di Indonesia terkait merebaknya isu virus Zika dari gigitan nyamuk, serta memberikan pesan terhadap warga negaranya yang hendak atau sedang melakukan perjalanan. (Insani, Amelia. 2017 : 2).

Di dalam masa pemerintahan PM Tony Abbot kebijakan *Travel Warning* masih diberlakukan karena pada masa pemerintahannya, Australia mendapatkan ancaman secara langsung dari pemerintah Indonesia yaitu pemerintah Australia melakukan penyadapan terhadap pemerintah Indonesia yang berujung ke situs – situs resmi serta pejabat. Hal tersebut menimbulkan rasa kekecewaan Australia terhadap pemerintah Indonesia yang mengganggu keamanan warga negaranya baik di Indonesia dan Australia.

4. PM Malcolm Turnbull (2015 – 2018)

Pada masa pemerintahan Malcolm Turnbull di tahun 2015 melanjutkan kasus *Bali Nine* yang masih bergejolak hingga menteri luar

negeri Australia Julie Bishop turun tangan dengan mengajukan Grasi kepada presiden Jokowi dalam menyelesaikan kasus tersebut, tetapi langkah yang dilakukan pemerintah Australia gagal untuk menyelamatkan warga negaranya yang divonis hukuman mati pada 29 April 2015, sehingga menjadi salah satu faktor pemerintah Australia tetap memberlakukan *Travel Warning* kepada Indonesia (Lynch, C. 2009 : 527-530).

Faktor lain yang menyebabkan pemerintah Australia masih memberlakukan *Travel Warning*, yaitu pada tahun 2017 terjadi kasus Bom bunuh diri di Jakarta, pembunuhan seorang petani oleh teroris di Sulawesi Tengah, baku tembak kelompok teroris dengan pasukan keamanan yang menyebabkan kematian di Poso dan Papua. Kemudian faktor lain terutama di Bali karena sebagai tujuan utama wisatawan Australia yaitu kejadian Gunung Agung sejak bulan September hingga memulai erupsi pada November 2017 mengganggu penerbangan dan beroperasinya aktifitas di bandara. Pemerintah Australia menerbitkan *Travel Warning* pada skala atau level 3 “ *Reconsider you need to travel* “ agar di luar zona pengecualian di sekitar kawah yang dapat erupsi dengan perubahan waktu yang singkat. (Saraswati, Dinda A., 2017 : 549 - 550).

Di dalam masa pemerintahan PM Malcolm Turnbull masih memberlakukan kebijakan *Travel warning* terhadap Indonesia

dikarenakan faktor yang mempengaruhi rasa ketidakpercayaan Australia terhadap Indonesia. Hal tersebut terbukti pada kasus *Bali Nine* yaitu terpidana yang memiliki status warga negara Australia dan divonis mati. Kemudian dalam penanganan warga negara Australia yang kurang memadai ketika bencana erupsi gunung agung di Bali yang menyebabkan para warga negara Australia terjebak di Bali karena pemberhentian maskapai penerbangan..

D. Penerapan *Travel Warning* pemerintah Australia

Travel warning dimengerti sebagai kebijakan berupa disiplin internasional, dalam praktiknya *Travel warning* merupakan kebijakan berupa pernyataan resmi pemerintah yang memperingatkan warganya terkait resiko dalam melakukan perjalanan ke suatu negara atau wilayah yang dianggap tidak aman. Sebagai sebuah kebijakan memiliki faktor pendukung dalam setiap perumusan kebijakan. Faktor tersebut yaitu keamanan regional dan internasional. (Braendle & Sajeewani, 2017 : 995).

Kemudian dalam implementasinya pemerintah Australia mengeluarkan *Travel warning* tersebut melalui hal berikut :

1. Level Kebijakan *Travel Warning*

Seperti adanya ancaman bahaya yang terjadi di Indonesia mengganggu kepentingan dalam melindungi keamanan warga negara Australia yang berada di Indonesia terutama Bali, sehingga Australia berkewajiban dalam melindungi

warga negaranya dengan mengeluarkan *Travel Warning*. Hal tersebut di terapkan pada level – level yang ditentukan oleh pemerintah Australia melalui tabel di bawah berikut :

Tabel 1.2 “ Level *Travel Warning* beserta Masing - Masing Nilai Keamanan “

Level	Nama	Nilai
1	“ Exercise normal safety precautions “	☀ ☀ ☀ ☀
2	“ Exercise a high degree of caution “	☀ ☀ ☀
3	“ Reconsider you need to travel “	☀ ☀
4	“ Do Not Travel “	☀

(Sumber : smartraveller.gov.au, diakses 15 Juni 2017)

Dalam mengetahui tingkat atau level dari setiap kebijakan yang diterbitkan, (Smartraveller.gov.au, 2017) sebagai berikut ;

i. Level 1 - Exercise normal safety precautions

Tingkat ini menunjukkan lingkungan keamanan secara keseluruhan yang serupa dengan di kota besar Australia, umumnya dengan sistem hukum dan ketertiban yang berfungsi dan pemerintahan yang stabil.

ii. Level 2 - Exercise a high degree of caution

Tingkat ini berarti bahwa ada risiko yang lebih besar terhadap lokasi ini yang lebih daripada biasanya. Tingkat ini mencerminkan lemahnya hukum dan sistem ketertiban, serta kejahatan kekerasan adalah lazim atau kekurangan dalam pelayanan publik (seperti lembaga penegak hukum yang kurang responsif)

iii. Level 3 – Reconsider you need to travel

Tingkat ini berarti bahwa ada ancaman mengancam hidup yang serius dan berpotensi yang membuat destinasi tidak aman untuk pariwisata dan tidak cocok untuk sebagian besar wisatawan. Hal ini bisa disebabkan oleh ancaman terorisme / penculikan yang terus berlangsung, seringnya insiden kejahatan kekerasan, kerusuhan sipil yang sedang berlangsung, penyakit yang menyebar, atau risiko keselamatan lainnya. Tujuan tersebut sering kali memiliki lingkungan keamanan yang tidak dapat diprediksi. Tingkat ini juga dapat diadopsi secara sementara ketika suatu kejadian seperti bencana alam telah membuat tujuan terlalu berisiko atau sulit secara logistik bagi sebagian besar wisatawan.

iv. Level 4 – Do Not Travel

Di dalam tingkat ini berarti situasi keamanan sangatlah berbahaya. Yang terjadi karena konflik bersenjata yang sedang berlangsung, kerusuhan sosial yang ganas, atau tingkat kejahatan kekerasan yang kritis. Sehingga para wisatawan tidak boleh bepergian

ke lokasi yang mendapat peringatan tersebut. Jika wisatawan tetap melakukan kegiatan dalam berpergian di area tersebut, diharapkan harus dapat mempertimbangkan untuk pergi.

Kemudian hal tersebut di implementasikan Pertama kalinya sejak tragedi Bom Bali I tahun 2002, Australia hanya menyarankan warganya untuk benar – benar mempertimbangkan perjalanan atau kunjungan ke Indonesia terutama Bali, karena level *Travel Warning* untuk keseluruhan Indonesia ada pada level kedua, yaitu “ *reconsider your need to travel* ” yang diberlakukan sampai dengan tahun 2004. Selanjutnya, setelah tragedi Bom Bali I, yang dilanjutkan ledakan bom di Depan Kedubes Australia di Kuningan pada akhir 2004 dan Bom Bali II pemerintah Australia mengambil kebijakan *Travel Warning* pada skala atau level tertinggi yaitu “ *Do Not Travel* ” di tahun 2005, Kemudian lanjut di tahun 2006 adanya perubahan level *Travel warning* untuk warga negaranya yang melakukan perjalanan ke Indonesia terutama Bali, pada level 3 “ *reconsider your need to travel* “. serta di sepakatinnya kerjasama keamanan Polisi Federal Australia dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam bentuk “ *Frame Work Agreement on Security Cooperation* ” atau disebut dengan istilah “ *Lombok Treaty* ” dalam memberantas kasus – kasus aksi terorisme di Indonesia hingga tahun 2012. (Insani, Amelia. 2017 : 4)

Pada tahun 2013 hingga 2017, Australia tetap mengeluarkan peringatan *Travel Warning* ini di terbitkan dengan penurunan level 2 “ *Exercise a High Degree of Caution* “ untuk keseluruhan Indonesia. Kemudian terpengaruh dari peristiwa maupun kejadian yang melanda di setiap wilayah negara Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2017 (Smartraveller.gov.au, 2017), Australia telah menerbitkan 6 (enam) kali kebijakan Travel Warning terhadap warga negaranya di Indonesia dengan level yang berbeda di setiap kasusnya dan wilayahnya, yaitu ;

- a. Level 2 pada bulan Mei 2017 dua penyerang bunuh diri meledakkan bom di sebuah pos polisi di Jakarta Timur menewaskan lima orang, termasuk para teroris.
- b. Level 3 pada bulan Agustus 2017, seorang petani dibunuh oleh teroris pada provinsi sulawesi tengah.
- c. Level 3 pada bulan Mei 2017, kelompok teroris di Poso bertukar tembakan dengan pasukan keamanan.
- d. Level 3 pada bulan Februari 2017 di Kabupaten Puncak Jaya , papua , pertukaran tembakan mengakibatkan seorang perwira Angkatan Darat dibunuh.
- e. Level 3 pada bulan November 2017 di Tembagapura , papua , seorang petugas polisi ditembak dan dibunuh.
- f. Level 3 terhadap kejadian Gunung Agung yang telah menunjukkan peningkatan aktivitas gunung berapi sejak akhir September 2017 dan

memulai erupsi skala kecil pada akhir November 2017. Dimana halnya Abu dari gunung berapi dapat mengganggu penerbangan dan operasi bandara. Maka dari itu pemerintah Australia menervbitkan peringatan resmi dengan serius, dan memberi himbauan agar tetap di luar zona pengecualian di sekitar kawah , yang dapat berubah dalam waktu singkat , atau menghubungi penyedia asuransi perjalanan secara langsung untuk menanyakan jika kebijakan anda dipengaruhi oleh aktivitas gunung berapi Gunung Agung.

2. Bentuk – bentuk *Travel Warning* Australia

1. Dokumen – Dokumen Resmi

Dalam implementasinya pemerintah Australia menerapkan atau mengeluarkan *Travel warning* melalui dokumen maupun surat resmi yang di berikan terhadap pemerintah negara yang dituju dalam memperingatkan situasi kondisi yang terjadi diwilayah tersebut atau langsung kepada warga negaranya. Hal tersebut menunjukan adanya sebuah hubungan antar negara dalam saling melindungi keamanan maupun meindungi warga negaranya dari ancaman – ancaman bahaya yang sedang terjadi. Sebagai contoh bentuk dokumen – dokumen tersebut antara lain, yaitu :

a. *Official Statement*

sebuah pernyataan resmi dari pemerintah yang diberlakukan untuk memberikan informasi kepada pihak – pihak terkait dalam kondisi serta alur penanganan khusus bagi pembacanya. Dalam hal

ini dibuktikan pada *Official Statement* dari pemerintah Australia ke pemerintah Bali yang diteruskan untuk seluruh wisatawan terutama wisatawan Australia. *Official Statement* tersebut berisikan tentang waspada akan terjadinya di wilayah Karangasem, Bali untuk tidak melakukan aktifitas wisata di sekitar wilayah tersebut yang dilampirkan pada gambar. 1

b. Visa

Sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu negara melalui salah satu perwakilannya. Dokumen tersebut berisikan izin untuk memasuki sebuah negara dalam periode waktu dan untuk tujuan tertentu, dalam pembuatannya terdapat informasi – informasi yang khusus sebagai penggunaannya. Dalam implementasinya *Travel warning* diterapkan juga pada surat permintaan rekaman perjalanan internasional, sebelum pembuatan visa dan dilampirkan pada gambar. 2

2. Surat Kabar

Selain itu, implementasinya di dalam bentuk dokumen resmi pemerintah Australia bekerjasama dengan media – media Internasional dan memediasikannya secara langsung serta menginformasikan secara luas kepada dunia internasional serta warga negaranya. Selain tujuan dalam memperingatkan warga negaranya, hal tersebut juga dapat di

dengar oleh masyarakat atau warga negara global terkait kondisi yang terjadi di sebuah negara yang ingin dikunjungi.

Contoh kerjasama pemerintah Australia dengan media massa dalam menginformasi *Travel warning* ke dunia internasional antara lain, yaitu :

a. BBC News

BBC atau *British Broadcasting Company* adalah sebuah perusahaan media massa Inggris yang telah diakui dalam dunia Internasional di bidang stasiun televisi dan radio britania raya. Dalam beritanya berisikan tentang *Australians warned to avoid Bali due to terror fears* atau warga negara Australia diperingatkan untuk menghindari Bali karena Ancaman bahaya terror yang dilampirkan pada Gambar 6

b. Luxury Magazine

Luxury Magazine adalah sebuah nama sebuah majalah dari sebuah perusahaan *Niche Media* dari Amerika di bidang permajalahan dan penerbitan. Dalam majalah tersebut berisikan tentang maksud dan tujuan *Travel Advisory or Travel warning* serta bahaya – bahaya yang terjadi. Hal lainnya berisikan tentang macam – macam destinasi yang terdapat di Bali serta Australia terlampirkan pada gambar 7.

c. WIT News

WIT News atau *Webintravel News* adalah sebuah media massa dari Australia yang berkembang dalam bidang media massa elektronik atau E-Newspaper. Dalam beritanya berisikan tentang *Indonesia Online Travel : Arrived with a Bang, Brace for the Boom* atau peringatan online indonesia tentang kedatangan ledakan, bersiap untukantisipasi bom yang terjadi di Bali, terlampirkan pada gambar 8

3. Website dan Aplikasi Online

Kemudian dalam pengembangannya, pemerintah Australia mengimplementasikan sebuah peringatan *Travel warning* dalam sebuah website serta aplikasi resmi pemerintah yang dapat diakses oleh semua kalangan. Situs – situs resmi hingga aplikasi tersebut bertujuan dalam memudahkan akses informasi para pelaku (*Traveller*) wisatawan yang berkunjung dalam suatu negara dapat memahami kondisi yang terjadi di sekitarnya.

Contoh situs atau website resmi dan aplikasi resmi dalam memudahkan akses informasi wisatawan tersebut antara lain, yaitu :

a. Smartraveller.gov.au

Smartraveller.gov.au adalah website atau situs resmi pemerintah Australia dengan kerjasama *Departement of Forreign Affairs and*

Treade (DFAT) berisikan tentang informasi – informasi terkait wilayah yang di berlakukan *Travel warning* oleh pemerintah Australia. Terlampirkan pada gambar 3.

b. immi.homeaffairs.gov.au

immi.homeaffairs.gov.au adalah website atau situs resmi Australia tentang keimigrasian dan akses informasi untuk menghubungkan warga negara dengan negaranya, yaitu Australia. Terlampirkan pada gambar 4.

c. Electronic Travel Advisory

Electronic Travel Advisory atau *UNDSS Travel Advisory* app adalah aplikasi elektronik yang dibuat oleh Komisi Pertahanan Negara Dunia atau PBB dalam meningkatkan serta memudahkan informasi dari setiap pengguna. Aplikasi tersebut dapat di unduh di setiap masing ponsel penggunanya. Terlampirkan pada gambar 5.

E. Dampak kebijakan *Travel Warning*

1. Sosial

Kebijakan *Travel Warning* yang diberlakukan di Indonesia oleh pemerintah Australia memberikan dampak negatif di bidang sosial. Karena kebijakan tersebut mempengaruhi hubungan antara penduduk Australia-Indonesia. Selain itu *Travel warning* dipahami

sebagai keinginan untuk menjaga jarak, menjauh, dan tak lagi berkomunikasi bagi warga Negara Australia. faktanya, sejauh ini belum ada serangan atau tanda-tanda terancamnya warga negara Australia di Indonesia terutama Bali. (Muhaimin, 2018)

2. Ekonomi

Dibidang ekonomi, kebijakan *Travel Warning* berpengaruh terhadap pendapatan Negara. Karena diberlakukannya kebijakan tersebut berarti pemerintah Australia membatasi warga negaranya untuk berkunjung dan tinggal di Indonesia. Otomatis, pendapatan Negara dibidang pariwisata menurun drastis, melihat wisatawan asing asal Australia adalah wisatawan tertinggi yang melakukan kunjungan mencapai 826.385 jiwa pada tahun 2013 di Bali. (Ardyan, Mohammad, 2013)

3. Diplomasi dan Militer

Travel Warning yang diberlakukan pemerintah Australia terhadap warga negaranya yang hendak ataupun sedang berada di Indonesia, tidak hanya berdampak di bidang sosial dan ekonomi Indonesia saja. Namun juga berdampak pada bidang diplomasi dan militer, terutama kerjasama bilateral antara kedua negara yang terkait. Jika di telusuri, Australia juga memberlakukan kebijakan *Travel warning* berkenaan dengan terbongkarnya kasus sadap pada masa pemerintahan Tony Abbott yang dilakukan oleh Australia terhadap

Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia melakukan sikap tegas terhadap Australia, yakni dengan memberhentikan beberapa bentuk kerjasama bilateral yaitu penarikan duta besar antar negara, pertukaran informasi, dan kebijakan - kebijakan penting dalam mengatasi penyelundupan pencari suaka ilegal, latihan bersama angkatan bersenjata, dan kerjasama lainnya yang bersifat gabungan. (Anonim, 2013)

Di dalam implementasinya kebijakan *Travel warning* pemerintah Australia memberikan dampak negatif bagi Indonesia yang diberlakukan kebijakan tersebut. Karena secara tidak langsung hal tersebut mempengaruhi ke dalam citra suatu negara dan adanya sebuah kepentingan dari suatu negara yang memberikan kebijakan tersebut. Selain itu juga menimbulkan sebuah dampak pandangan politik.

F. Persepsi Wisatawan Australia terhadap *Travel Warning* di Bali

Salah satu warga negara Australia menyatakan telah melakukan liburan dan tinggal di Bali hampir 3 bulan. Kemudian alasannya dalam berkunjung ke Bali yaitu pertama, biaya yang dia keluarkan begitu murah dalam melakukan perjalanan ke Bali. Kedua, Jarak yang sangatlah dekat antara Australia dan Bali, hanya memakan waktu kurang lebih 3 jam melalui perjalanan udara atau menggunakan pesawat. Selain itu, bagi warga negara Australia yang melakukan liburan dikarenakan pemandangan yang begitu menarik serta keramah tamahan warga bali

terhadap wisatawan asing dan memiliki ombak yang sangat menantang dalam melakukan olah raga selancar atau *Surfing*. Hal lainnya yaitu, warga negara Australia menganggap Bali sebagai second home atau rumah kedua dan sebagai destinasi utama dalam melakukan liburan bagi mereka karena keunikan yang ada di Bali. Sehingga melalui hasil wawancara peneliti dengan Robert Jacob di Seminyak, Bali. Terlihat bahwa warga negara Australia menciptakan pandangan terhadap kecintaannya pada pulau Bali.

Kemudian juga salah satu warga negara Australia menyatakan hal yang sama dalam melakukan kunjungan wisatanya di Bali. Adapun tanggapan darinya terkait *Travel warning* yang di berlakukan kepada Indonesia, yaitu sebagian besar bagi warga negara Australia menganggap *Travel warning* bukan sebagai larangan khusus kepada Indonesia melainkan peringatan atau himbauan kepada warga negaranya yang sedang melakukan perjalanan di Indonesia terutama Bali, karena pemerintah Australia memiliki rasa waspada terhadap kejadian – kejadian yang menimpa warga negaranya. Hal tersebut yang menimbulkan di keluarkannya kebijakan tersebut. Kemudian terkait hukum yang paten dalam kebijakan tersebut kenyataannya tidak ada di negara Australia, hanya saja proses dalam pembuatan berkas ketika *Travel warning* pada level tinggi, untuk melakukan perjalanan keluar dari negara Australia diperlambat prosesnya. Seharusnya seluruh berkas – berkas tersebut dapat selesai dalam waktu 2 minggu menjadi hingga 1 sampai 3 bulan. Selain itu, warga negara Australia merasakan senang ketika adanya visa gratis

dalam melakukan perjalanan ke Indonesia, seperti pada tahun 2015 lalu. Hal tersebut terbukti bahwa *Travel warning* adalah sebuah kebijakan peringatan dari pemerintah Australia dalam memberikan informasi ancaman bahaya yang terjadi di setiap wilayah atau negara yang diberlakukannya, melalui hasil wawancara peneliti dengan Maria Sheryl di Gunung Batur, Kintamani, Bali

Kemudian ada juga pernyataan dari Duta besar Australia Grigson dalam acara pertemuan dengan perwakilan industri pariwisata Indonesia di Jakarta, 2016, yaitu

“ Dorongan serupa untuk Australia memberi tambahan 214,421 wisatawan setiap tahun; menambah 3.4 triliun rupiah untuk ekonomi Indonesia. Seperempat dari wisatawan yang berkunjung ke Bali adalah warga Australia. Kami ingin melihat lebih banyak lagi warga Australia datang ke Indonesia dan menikmati matahari terbit di Gunung Bromo, mencicipi pedasnya kuliner Padang dan menyaksikan matahari terbenam di Borobudur, ” kata Paul Grigson. (Anonim, 2016)

Hal tersebut kemudian di tanggapinya oleh Dubes Besar RI Najib Riphath Koesoema, yaitu :

“ Lebih banyak warga Australia dan Indonesia saling mengenal negara-negara masing – masing, semakin mendalam hubungan kita. Industri pariwisata adalah bagian integral untuk kemakmuran kedua negara. Saat ini waktu kita untuk saling meraih, bekerjasama sebagai tetangga dan membentuk masa depan kita bersama. ” (Anonim, 2016)

Sehingga diluar keuntungan ekonomi, pariwisata membangun tautan antar warga. Membuka dunia baru dan memperluas saling pengertian. Australia adalah tujuan wisata nomor sepuluh paling populer untuk wisatawan Indonesia pada 2014 dengan total wisatawan 149,800,

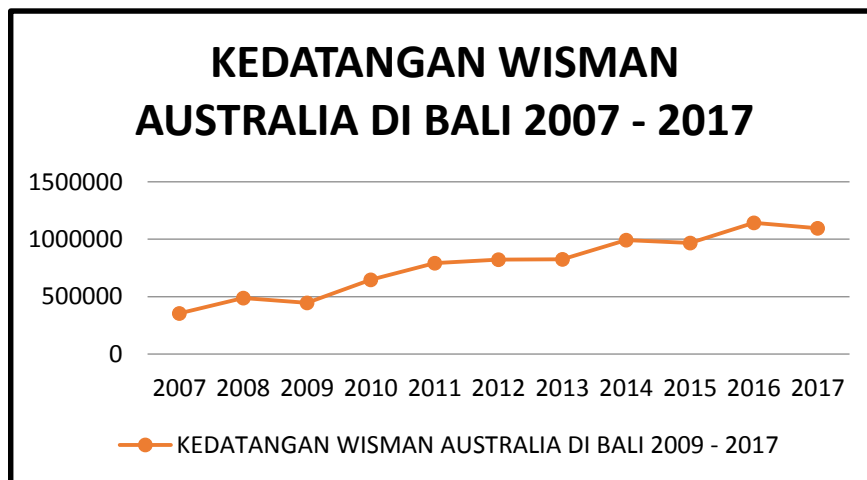
naik sebesar 7.6 persen dari 2013. Semakin banyak warga Indonesia yang bepergian ke Australia akan membantu memperbanyak rute – rute penerbangan yang ada dan membawa keuntungan ekonomi untuk kedua negara. Kemudian akses bebas visa perjalanan ke Indonesia akan menjadi faktor penarik yang besar bagi warga Australia dalam mempertimbangkan pilihan untuk berlibur.

Menurut hasil wawancara dan pernyataan berikut kebijakan *Travel warning* adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Australia sebagai tindakan reaktif untuk mengatasi ancaman terkait melindungi warga negaranya. Selain itu dalam pelaksanaannya *Travel warning* adalah sebuah peringatan atau himbauan terhadap warga negaranya yang melakukan perjalanan keluar dari negaranya, dan tidak memiliki hukum yang paten bagi warga negaranya. Hal tersebut bertujuan agar memudahkan para wisatawan mengetahui kondisi yang terjadi ketika melakukan perjalanan ke suatu negara sekaligus memberikan pandangan agar lebih mempertimbangkan kembali sebelum melakukan perjalanan. Sehingga memberikan dampak seleksi alam akan dirinya sendiri yang mempengaruhi ke dalam tingkat kunjungan wisatawan Australia di Bali. Di sisi lain terlihat dari pernyataan dari Duta besar antara Australia – Indonesia yang menyatakan bentuk kerjasama antar negara sehingga kebijakan tersebut tidak bersifat memberikan tekanan dan tetap menjadi suatu kenyamanan bagi wisatawan Australia di Bali.

G. Pengaruh Tingkat Kunjungan Wisatawan Australia di Bali

Berdasarkan hasil wawancara serta pernyataan yang di jelaskan sebelumnya kebijakan *Travel warning* berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan Australia di Bali, yang digambarkan melalui grafik dibawah berikut :

Grafik 1.2 “ Kedatangan WISMAN Australia di Bali 2007 – 2017 “



(Sumber : <https://disparda.baliprov.go.id>. Diakses pada 10 September 2017)

Hal tersebut terbukti pada tahun 2007 hingga 2010 masa pemerintahan Perdana Menteri Kevin Rudd, berhasil mengatasi tingkat kunjungan wisatawan di Bali. Selain kebijakan yang di keluarkan Perdana Menteri Kevin Rudd, hal lain yang mempengaruhi yaitu terjadinya Bom Bali II serta pengeboman Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot yang kedua. Kemudian pasca kejadian tersebut mengalami peningkatan hingga di tahun 2010, dikarenakan pemerintah Australia melakukan kerjasama Australia – Indonesia dalam pemberantasan Terorisme “ *Joint Investigation and Intelligence Team to Investigate the Bali Bombing* “, sehingga meningkatkan rasa aman warga negara Australia bekunjung kembali ke Bali.

Kemudian pada tahun 2010 hingga 2012 masa pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard, mengalami peningkatan yang begitu pesat. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor berhasilnya penangkapan besar – besaran tersangka kasus Terorisme di Indonesia terutama Bali dan terbentuknya sebuah kerjasama ekonomi antar negara tersebut dalam buku pemerintah Australia “ *White Paper* “ yang berjudul “ *Australia in The Asian Century* “. Meskipun *Travel warning* pemerintah Australia masih diberlakukan, hal tersebut tidak mempengaruhi pandangan wisatawan Australia dalam melakukan perjalanan di Bali. Sehingga minat wisatawan Australia di Bali mengalami peningkatan yang pesat.

Pada tahun 2013 masa pemerintahan Australia kembali di jabat oleh Perdana Menteri Kevin Rudd dalam masa 1 (satu) tahun. Dalam pemerintahannya masih mengacu pada kebijakan pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard. Sehingga tidak mengalami penurunan maupun kenaikan (stabil) dalam mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan Australia di Bali.

Pada tahun 2013 hingga 2015 masa pemerintahan Australia di duduki oleh Perdana Menteri Tony Abbott. Pada masa pemerintahannya kebijakan *Travel warning* pemerintah Australia diberlakukan kembali dikarenakan faktor terkait penyadapan terhadap Indonesia. Tetapi kebijakan *Travel warning* yang diberlakukan pemerintah Australia bukan menjadi wisatawan Australia untuk melakukan kunjungan di Bali. Sehingga tingkat kunjungan wisatawan dalam melakukan perjalanan di Bali meningkat. Hal tersebut terjadi karena *Travel*

warning yang diberlakukan bukan kepada warga negaranya, melainkan dijadikan sebagai kepentingan sebuah negara dalam berpolitik.

Pada tahun 2015 hingga 2017 masa pemerintahan Australia diduduki oleh Perdana Menteri Malcolm Turnbull. Pada masa pemerintahannya tingkat kunjungan wisatawan meningkat dari tahun 2015 hingga 2016. Faktor yang menunjang dikarenakan Indonesia membuka pintu kepada 169 negara termasuk Australia dalam kebijakan visa gratis selama 30 hari. (Indonesia.travel, 2016). Hal tersebut semakin memicu minat warga negara Australia dalam melakukan perjalanan, yang notabene jarang – jarang visa gratis bagi Australia ke Indonesia terutama Bali. Tetapi dalam masa pemerintahan Perdana Menteri Malcolm Turnbull tidak semata – mata mencabut *Travel warning*, melainkan menambahkan kebijakan *Travel warning* dengan level – levelnya yang berbeda ke setiap wilayah Indonesia. Bertujuan agar setiap wisatawan Australia dapat mempertimbangkan kembali perjalanan ke Indonesia terutama Bali yang sedang mengalami bencana erupsi gunung berapi. Sehingga kebijakan tersebut mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan di Bali dan mengalami penurunan.

Berdasarkan pernyataan dari grafik tersebut kebijakan *Travel warning* pemerintah Australia dapat mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan Australia. Tetapi disisi lain terkadang tidak mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan tersebut, sehingga mengalami kenaikan dan penurunan yang dinamis. Faktor yang menimbulkan hal tersebut yaitu kembali fungsi dan tujuannya, apabila kebijakan tersebut tidak diberlakukan kepada fungsi dan

tujuan utamanya dalam melindungi warga negaranya. Maka kebijakan tersebut tidak dapat mempengaruhinya. Faktor lain yang menimbulkan yaitu adanya kebijakan luar negeri yang berlaku terhadap ketertarikan wisatawan Australia di Bali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kebijakan *Travel warning* pemerintah Australia terhadap tingkat kunjungan wisatawan Australia di Bali, maka diperoleh kesimpulan yaitu ;

1. Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi Australia, tetapi akan kondisi negara yang terjadi di Indonesia di sisi lain juga menjadi ancaman bagi pemerintah Australia. Ancaman tersebut meliputi ancaman terorisme, kerusuhan, bencana alam dan lain sebagainya. Dalam menjaga keamanan warga negaranya pemerintah Australia menerapkan kebijakan *Travel warning* dalam keamanan manusia “ *Human Security* “ atau warga negaranya.
2. Australia melakukan kerjasama melalui konsep *Good Neighbor Policy*, dalam meningkatkan keamanan manusianya dari ancaman – ancaman bahaya terhadap warga negaranya. Dengan memberikan dukungan kerjasama dalam melawan terorisme di Indonesia dengan perjanjian “ *Memorandum of Understanding Combating International Terrorism* ”. Tetapi hal tersebut bukan sebagai alasan pemerintah Australia mencabut *Travel warning* kepada Indonesia.
3. Peringatan perjalanan terdapat 3 macam, yaitu Travel Ban, Travel Advice atau Travel Advisory, dan Travel warning. Tetapi Kebijakan

pemerintah Australia terkait peringatan perjalanan di terapkan hanya dengan *Travel warning*. Hal tersebut memberikan dampak Indonesia pada bidang sosial, ekonomi hingga diplomasi dan militer, selain itu *Travel warning* yang dikeluarkan oleh Australia berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan Australia di Bali yang dinamis. Dikarenakan bentuk *Travel warning* pemerintah Australia bersifat peringatan yang tidak mengikat warga negaranya. Selain itu, warga negara Australia menganggap Australia – Indonesia memiliki hubungan yang baik. Hal lainnya yang mempengaruhi yaitu warga negara Australia menganggap Indonesia sebagai rumah kedua *second home* terutama di Bali. Kemudian faktor yang sangat berpengaruh bagi warga negara Australia pertama, biaya yang dikeluarkan sangatlah murah dalam melakukan perjalanan ke Bali. Kedua, jarak antara Australia dengan Bali sangatlah dekat, yaitu dengan menggunakan pesawat waktu yang di tempuh kurang lebih hanya 3 jam. Ketiga, kenyamanan suasana dan kemudahan akses yang di dapat. Sehingga wisatawan Australia bertempat tinggal di Bali dalam jangka waktu yang lama, bahkan rela meninggalkan negaranya untuk menjadi warga negara Indonesia terutama di Bali.

B. Saran

Setelah menarik kesimpulan mengenai pengaruh kebijakan *Travel warning* pemerintah Australia terhadap tingkat kunjungan wisatawan Australia di Bali, terdapat saran oleh peneliti dari penelitian ini yaitu ;

1. Dalam penelitian ini peneliti masih kesulitan dalam mencari data maksimal tentang Australia, maka melalui referensi penelitian dari peneliti ini dapat dikembangkan lagi oleh peneliti berikutnya.
2. Minimnya data terkait Australia membuat peneliti kesulitan dan memakan waktu dalam menyelesaikan penelitian ini, maka alangkah baiknya meningkatkan kerjasama terlebih dahulu dengan beberapa lembaga yang memiliki data terkait Australia agar dapat memudahkan peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Bakrie,Umar Suryadi, 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*.
Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.

Lexy J. Moelong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT
.Remaja Rosdakarya.

Oili & Juntunen. 2015. *Human Security : Perspective and Practical Example*.
The Civil Society Confilct Prevention Network KATU.

Referensi Jurnal Ilmiah

Abdullah, Asman, 2018. *Radikalisasi Gerakan Jama'ah Ansharut Tuhid dan Pengaruh ISIS di Indonesia*. Sosiologi Reflektif. Vol. 12. No. 2. Hal.
213 - 232

Arsika, I Made Budi. Jaya, Ida Bagus Surya Dharma & Satyawati, Ni Gusti Ayu
Dyah, 2018. *Kebijakan Travel Warning dan Pembatasan Hak Berwisata*. vol. 13 – No.1. Hal. 24 – 36.

- Aji, Banu Punto, 2012. *Kebijakan Travel Warning Australia Terhadap Indonesia Pasca Serangkaian Serangan Serangan Bom*. Vol. 1. Hal. 1 – 10.
- Bhaskara, Gde Indra, 2017. *Gunung Berapi dan Pariwisata : Bermain Api*. Jurnal Analisis Pariwisata. Vol. 17. No. 1. Hal. 31 - 40
- Braendle & Sajeewani. 2017. *Asia Pasific Journal of Tourism Research : Terrorism and Travel Advisory Effects on International Tourism*. Vol. 22. 2017. 991 – 1004.
- Beshay, Amany N, 2017. *Travel Warnings Versus Actual Travel Danger; An Analysis of U.S. Department Of State Travel Warnings To Egypt And Other Countries*. *Journal of Tourism Research*, 18 : 5-20, <http://jotr.eu/images/T18/T-18.pdf>
- Blankfield, Bryan, 2016. *The Good Neighbor : Franklin D. Roosevelt and The Rhetoric of America Power*. *Quarterly Journal of Speech*. Vol. 102. 2016. 319 – 323.
- Dugis, Vinsensio, 2009. *Memperkokoh Hubungan Australia – Indonesia*. *Global & Strategis*. No. 2. Hal. 309 – 324.
- Gita, Andani, 2017. *Kebijakan Travel Warning Australia dan Pengaruhnya Terhadap Minat Kunjungan Wisatawan di Bali*. No. 1. Hal 1 – 16.

- Hall, C. Michael. 2008. *Tourism Planning and Human Security: Knowledge and Intervention Construction and Trust in “Solving” Environmental Change*. Vol.1. Hal. 1 – 44
- Hanifah, Hana, 2017. *Kejasama Intelejen Indonesia dengan Australia dalam menanggulangi ancaman Terorisme di Indonesia*. Hal. 14 – 106.
- Hardiana, Made. Sushanti, Suksma. Fansisaka, Idin. 2008. *Kerjasama Kontra – Terorisme Antara Australia dengan Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme di Indonesia*. Vol. 1, Hal. 1 – 15.
- Harini, Setyasih & Halifa Haqqi, 2018 “ Penguatan Human Security Melalui Pemberdayaan Perempuan di Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar “. ADIWIDYA, vol. II, no. 1, hal. 6 – 13.
- Haryani, Silvia. 2008. *Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia : Perbandingan Antara Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono*. Vol. 21. No. 4. Hal 352 – 360.
- Insani, Amelia. 2017 “ Dampak Vonis Hukuman Mati Kepada Terpidana Kasus BALI NINE Terhadap Hubungan Diplomatik Antara Indonesia dengan Australia “ Vol. 1, Hal 1 – 26.
- Janatin, Umul. 2017 “ Perkembangan Hubungan Australia dengan Amerika “. Educational Policy Journal. Vol. 1. Hal 21 – 27. Diakses melalui

https://www.academia.edu/5279927/PERKEMBANGAN_HUBUNGAN_AUSTRALIA_DAN_AMERIKA_SERIKAT pada 20 juni 2017.

Lo'wenheim, Oded, 2007. *The Responsibility to Responsibilize : Foreign Offices and The Issuing of Travel Warning*. International Political Sociology, Vol. 12, No. 1, Hal. 203 – 221.

Lynch, C. 2009. *Indonesia's Use of Capital unishment For Drug-Trafficking Crimes : Legal Obligations, Extralegal Factors, and The Bali Nine Case*. Colombia University School of Law. Halaman 527-530.

Muhibin Raihan Ramadhan, 2011. *Human Security*. Hal. 1 – 12. Diakses melalui <http://id.scribd.com/doc/51882487/Human-Security>, pada 20 Juni 2017, Pkl. 19.05 WIB

Putra, I N Darma dan Michael, Hitchcock. 2008 “ *Terrorism and Tourism in Bali and Southeast Asia*”, *Tourism in Souteast Asia*. Denmark: NIAS Press. Vol. 4. Hal. 83 - 98

Rizal A. Hidayat. “ *Keamanan Manusia dalam Perspektif Studi Keamanan Kritis Terkait Perang Intra-Negara* “. Vol. 1. (INTERMESTIC : Journal of International Studies). 2017. 108 – 129

Saraswati, Dinda Ayu. 2017 “ *Sekuritisasi Migrasi Australia Masa Kepemimpinan PM Malcolm Turnbull* “. Journal of International Relations. Vol. 5. No. 3. Hal. 544 – 553

Wiyatiningrum, Dwi A. 2015. *Hubungan Bilateral Australia – Indonesia pada Masa Perdana Menteri Kevin Rudd*. Hal. 75 – 97

Wulandari, Putu Ayu. 2015. “ *The Decision of Australian Goverment to Assign The Direct Conversion of Australia Dollar – Reminbi* “. Vol. 1. Hal. 14 – 60

Referensi Media dan Website

Anonim, 2010. *Bencana Alam Indonesia Mulai Tahun 2004 hingga 2010*. Diakses melalui <https://pekanbaru.tribunnews.com/2010/11/03/inilah-bencana-alam-indonesia-dari-2004-hingga-2010>. Pada 15 September 2017

Anonim, 2010. *Noordin M. Top Dipastikan Tewas*. Diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/02/100201_noordin. pada 20 Juni 2018.

Anonim, 2011. *Gempa Selatan Bali 13 oktober 2011*. Diakses melalui <https://www.kompasiana.com/marufinsudibyo/550eaa4fa33311bf2dba83b0/gempa-selatan-bali-13-oktober-2011-magnitude-6-0>. Pada 20 february 2019

Anonim. 2011 “ *PM Australia Apresiasi Bantuan Indonesia* “. Diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2011/01/20/18491873/pm.australia.apresiasi.bantuan.indonesia>. Pada 20 Juni 2017.

Anonim. 2012. *Australia PM Julia Gillard Outlines Asia Manifesto*. Diakses melalui <https://www.bbc.com/news/world-asia-20114032> pada 28 oktober 2018.

Anonim, 2013 “ kerjasama australia – indonesia dihentikan “ diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/multimedia/2013/11/131120_ri_australia_kerjasama.shtml?bw=bb&mp=wm&bbcws=1&news=1. Pada 20 Februari 2018

Anonim. 2014. *ISIS Deklarasi Hingga Sebar Lowongan Budak Seks di UIN*. Diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2014/08/08/isis-deklarasi-hingga-sebar-lowongan-budak-seks-di-uin>. Pada 8 Agustus 2014.

Anonim. 2014. *Sinabung Meletus Lagi, Keluarkan Awan Panas*. Diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/10/141005_gunung_sinabung_meletus_lagi. Pada 20 september 2017

Anonim. 2015 “ *Australian Warned to Avoid Bali due to Terror Fears* “. Diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151220_indonesia_teroris. Pada 21 Desember 2015.

Anonim. 2015 “ Mengapa Turis Australia Senang Ke Bali ? “. Diakses melalui

<https://www.kompasiana.com/empuratu/55485abf547b61e90b2524fc/>

[mengapa-turis-australia-senang-ke-bali](#). Pada 15 Juni 2017

Anonim. 2016. “ Dubes Australia Ingin Lebih Banyak Warganya Menikmati

Sunrise Gunung Bromo, Kuliner Padang, Sunset di Borobudur “.

Diakses melalui [https://indonesiatouristnews.com/dubes-australia-](https://indonesiatouristnews.com/dubes-australia-ingin-lebih-banyak-warganya-menikmati-sunrise-gunung-bromo-kuliner-padang-sunset-di-borobudur/)

[ingin-lebih-banyak-warganya-menikmati-sunrise-gunung-bromo-](#)

[kuliner-padang-sunset-di-borobudur/](#). Pada 6 Februari 2017

Anonim. 2016. “ *Saling Ketergantungan Indonesia Australia akan Menguat di*

Masa Depan “. Diakses pada 18 Juli 2016 melalui

[https://news.detik.com/abc-australia/d-3255394/saling-ketergantungan-](https://news.detik.com/abc-australia/d-3255394/saling-ketergantungan-indonesia-australia-akan-menguat-di-masa-depan)

[indonesia-australia-akan-menguat-di-masa-depan](#).

Anonim. 2017 “ Tawaran Kerjasama Australia – Indonesia Bidang Pariwisata

“. Diakses pada 15 Juni 2017 melalui

[https://nasional.kontan.co.id/news/ini-tawaran-kerja-sama-pariwisata-](https://nasional.kontan.co.id/news/ini-tawaran-kerja-sama-pariwisata-dari-australia)

[dari-australia](#).

Antony, Nouval, 2019. *BMKG Ungkap Catatan Sejarah Gempa Bumi di Bali*.

Diakses melalui [https://news.detik.com/berita/d-4627261/bmkg-](https://news.detik.com/berita/d-4627261/bmkg-ungkap-catatan-sejarah-gempa-bumi-di-bali)

[ungkap-catatan-sejarah-gempa-bumi-di-bali](#). Pada 20 February 2019

Ardyan, Mohammad, 2013 “ Kunjungan Australia ke Bali Bisa Berkurang “ diakses melalui <https://m.merdeka.com/uang/kunjungan-wisatawan-australia-ke-bali-bisa-berkurang.html>. Pada 20 Februari 2018

Disparda.baliprov.go.id. 2017. *Official Statement Bali Comment*. Diakses melalui <http://disparda.baliprov.go.id/2017/09/26/bali-government-provinces-official-statement-in-bali-on-26th-september-2017/> pada 5 Juni 2018

Downer, The. Hon Alexander. 2014. *Joint Investigation and Intelligence Team to Investigate the Bali Bombing*. Diakses melalui https://foreignminister.gov.au/releases/2002/fa148a_02.html. Pada 15 Juni 2017.

Fathkul, Sukirno. 2013. *ASITA : Indonesia Harus Balas Travel Warning Australia*. Diakses pada 20 Juni 2017 melalui <https://kabar24.bisnis.com/read/20131122/19/188135/asita-indonesia-harus-balas-travelwarning-australia>.

Immi.homeaffairs.gov.au, 2017. *Request for International Movement Records*. Diakses melalui <https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/request-movement-records> pada 16 Juni 2018

Indonesia.embassy.gov.au. 2009 “ Australia Memperkuat Kerjasama dengan Indonesia dalam Keamanan Perbatasan “. Diakses melalui

https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SMICM09_01.html

pada 20 Juni 2017

Indonesia.embassy.gov.au. 2011 “ Radio Script – Hubungan Pendidikan Australia – Indonesia “. Diakses melalui <https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/RS110734.html> pada 5 February 2019.

Indonesia.embassy.gov.au. 2017. “ *Mendorong Pertumbuhan Pariwisata dan Ekonomi – AUSTRALIA dan INDONESIA* “. Diakses melalui https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM16_009.html. Pada 20 Juni 2017, Pkl. 20.00 WIB

Indonesia.travel, 2016. *Visa Free for 169 Countries to Travel to Indonesia*. Diakses melalui <https://www.indonesia.travel/gb/en/trip-ideas/visa-free-for-169-countries-to-travel-to-indonesia> . pada 6 juli 2018

Jaya, Gede. 2012. *Banjir Bandang Terjang Jembrana, Jembatan 7 Meter Ambrol*. Diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/banjir-bandang-terjang-jembrana-jembatan-7-meter-ambrol.html> pada 23 Januari 2018

Manan, Abdul. 2013. “Sejumlah Fakta Soal Peringatan Serangan 9/11”. Diakses pada 5 February 2019 melalui <https://m.tempo.co/read/news/2013/09/11/116512516/sejumlah-fakta-soal-peringatan-serangan-9-11>.

Muhaimin, 2018 “ Australia keluarkan Travel Warning ke Indonesia “ diakses melalui <https://international.sindonews.com/read/1363130/40/australia-keluarkan-travel-warning-ke-indonesia-1544893574>. Pada 20 Februari 2018

Priyambodo, R.H., 2016. “ Latar Belakang Kebijakan Travel Warning pemerintah Australia. Diakses melalui www.antaranews.com/LATAR_BELAKANG_KEBIJAKAN_TRAVEL_WARNING_2014. Pada 14 Juni 2017

Shabara Wicaksono. 2016. *Warga Australia Bebas Visa ke Indonesia, NETIZEN : Kapan Warga Indonesia Bebas Visa Juga ke Australia ?*. Diakses melalui <https://phinemo.com/bebas-visa-indonesia-australia/>. Pada 20 Juni 2017, Pkl. 19.30 WIB

Smartraveller.gov.au. 2017 “ DFAT (Departement of Foreign Affairs and Trade) [AU] : Indonesia “. Diakses melalui <https://smartraveller.gov.au/Countries/asia/south-east/Pages/indonesia.aspx> pada 5 Juli 2017

Smartraveller.gov.au. 2017. *DFAT (Departement of Foreign Affairs and Trade) [AU] : Travel Advice Explained*. Diakses melalui <https://smartraveller.gov.au/resources/Pages/travel-advice-explained.aspx>. Pada 10 Juni 2017

Suriyani, Luh De, 2017. *Siaga Bencana Diapit Dua Sumber Gempa Bumi*. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2016/08/04/siaga-bencana-bali-diapit-dua-sumber-gempa-bumi/> . pada 6 Juli 2018

Theaustralia.com, 2017 “ Indonesia travel warning still on “. Diakses melalui <https://www.theaustralian.com.au/archieve/news/indonesia-travel-warning-still-on-story.%20Diakses%2030%20Mei%202017> pada 30 Mei 2018

Tradingeconomic.com, 2017. *Indeks Terorisme di Indonesia*. Diakses melalui https://id.tradingeconomics.com/indonesia/terrorism_index. Pada 10 Juni 2017.

Tribunnews, 2010. *5 Fakta Tragedi Bom Bali I dan Kronologi Hingga Pelaku Amrozi*. Diakses melalui <https://bali.tribunnews.com/2010/05/02/tribun-wiki-5-fakta-tragedi-bom-bali-i-kronologi-hingga-pelaku-amrozi-cs?page=2> pada 5 Agustus 2017

Umarul, Faruq, 2017 “ Gunung Agung Erupsi, 445 Penerbangan terkena dampak “. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171127112313-92-258297/gunung-agung-erupsi-445-penerbangan-terkena-dampak> pada 10 Februari 2017

United Nations. 2019. “ *HUMAN SECURITY IN THEORY AND PRACTICE : An Overview of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security* “. Diakses melalui www.un.org/humansecurity. pada 10 Juni 2019

Waluyo, Andylala. 2012. “ Polri Tangani 14 Kasus Terorisme dan 78 Tersangka Selama Tahun 2012 “. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/polri-tangani-14-kasus-teroris-dengan-78-tersangka-selama-tahun-2012/1573757.html>, pada 10 april 2019.

Yoenus, Mohamad, 2018. *Australia tiba – tiba mengeluarkan peringatan perjalanan Travel warning ke Indonesia, ini alasan mereka*. Diakses melalui <https://www.tribunnews.com/2018/12/16/australia-tiba-tiba-keluarkan-peringatan-perjalanan-travel-warning-ke-indonesia-ini-alasan-mereka>. Pada 16 Desember 2018

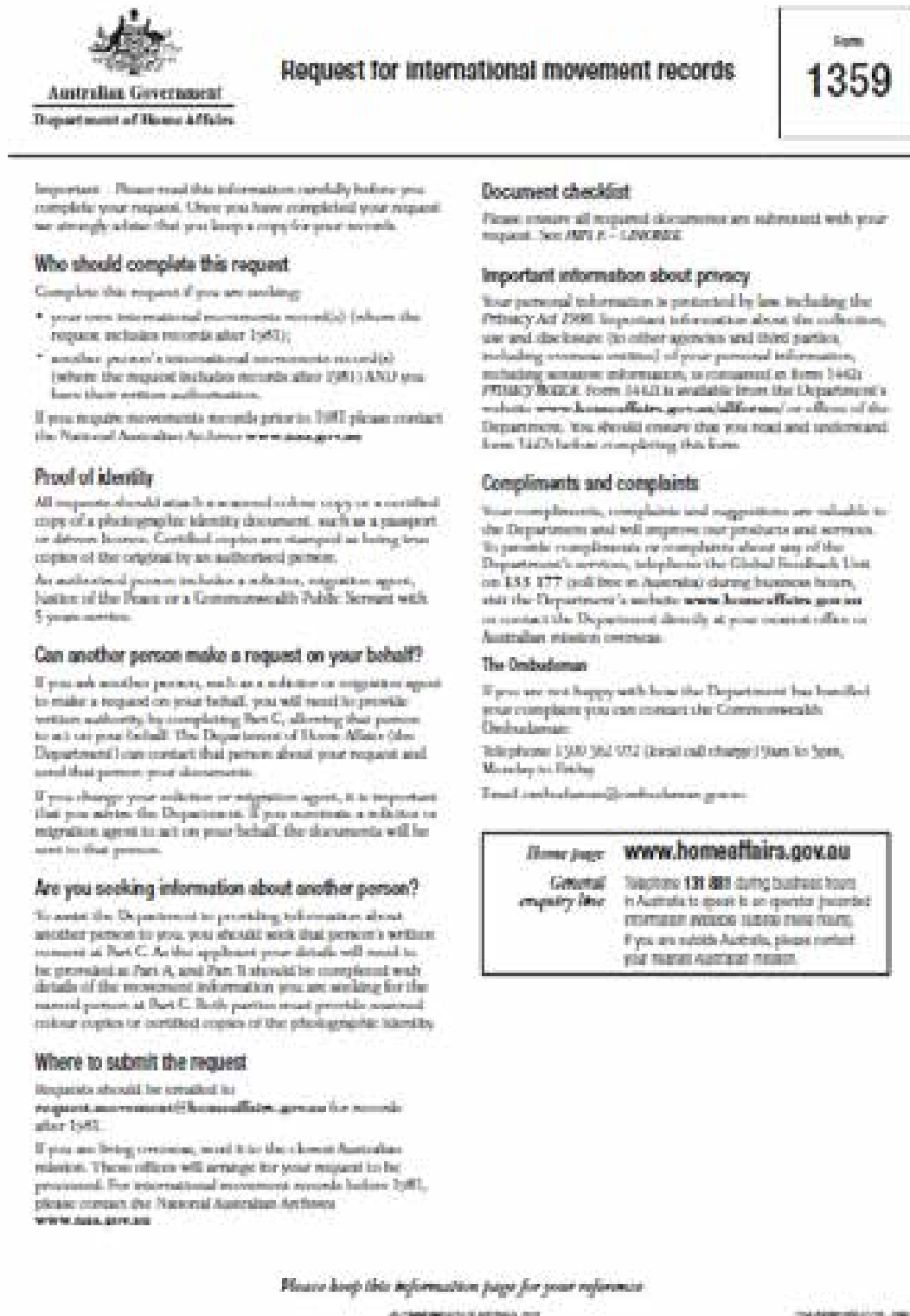
LAMPIRAN

Gambar 1. “Dokumen Resmi Pemerintah Terhadap Wisatawan di Bali “



(Sumber : <https://disparda.baliprov.go.id>, diakses 5 Juni 2017)

Gambar 2. “ Dokumen Resmi Pemerintah Australia melalui Visa “



(Sumber : <https://immi.homeaffairs.gov.au>, diakses 16 Juni 2017)

Gambar 3. “ Website resmi Australia Tentang *Travel Warning* “



(Sumber : <https://smartraveller.gov.au>, diakses 15 Juni 2017)

Gambar 4. “ Website Resmi pembuatan Visa Australia “



(Sumber : <https://immi.homeaffairs.gov.au>, diakses 16 Juni 2017)

Gambar 5. “ Aplikasi UNDSS *Travel Advisory – United Nations* “



(Sumber : <https://apps.apple.com/us/app/electronic-travel-advisory/id1408432753>, diakses pada 20 Juni 2018)

Gambar 6. “ BBC News : Australia peringatkan waspada terhadap teror bali “



(Sumber : <https://www.bbc.com>, diakses 10 Juni 2017)

Gambar 7. “Luxury Magazine – Travel Advisor”



(Sumber : <https://luxurytraveladvisor.com>, diakses 15 Juni 2017)

Gambar 8. “Indonesian Online Travel Warning : Dangerously Beautiful”



(Sumber : <https://webintravel.com>, diakses 15 juni 2017)

Hasil wawancara peneliti dengan wisatawan Australia

Narasumber I

Name : Robert Jacob

From : Sydney, Aussie

Date of Interview : Saturday, on October, 28th 2017

Place of Interview : Seminyak, Bali

No.	Question	Answer
1.	Sudah berapa lama di Bali ?	Kurang lebih sekitar 3 bulan, dan ini liburan kedua saya di bali
2.	Mengapa anda memilih Bali ?	Saya juga tidak tahu, hahaha ... Saya rasa Bali adalah rumah saya dan selalu destinasi utama saya ketika berlibur, Bali sangatlah mengagumkan, karena anda tahu bahwa penduduk di bali sangat ramah dan saya bisa merasakan nuansa yang belum pernah saya rasakan ketika berlibur seperti budaya dan spiritual yang begitu kental. Selain itu saya dapat menikmati ombak yang menakjubkan ketika saya sedang berselancar, kemudian semuanya murah sehingga saya dapat berbelanja sepuas mungkin
3.	Bagaimana anda melakukan perjalanan dari Aussie ke Bali ?	Saya melakukan perjalanan menggunakan pesawat dan harga penerbangan ke Bali pun sangatlah murah dan tidak memakan waktu yang lama , sekitar 3 jam dalam perjalanan.
4.	Baik, terima kasih, broo !!!	You too, bro !!!

Narasumber II

Name : Maria Sheryl

From : Adelaide, Aussie

Date of Interview : Saturday on November, 4th 2017

Place of Interview : Mount of Batur, Kintamani, Bali



No.	Question	Answer
1.	Sudah berapa lama dan berapa kali anda ke Bali ?	Sekitar 1 Bulan dan ini sudah ketiga kalinya saya berlibur di Bali
2.	Kapan saja kalau saya boleh tau ?	2012, 2015 ketika ada visa gratis ke Indonesia, hahaha dan Sekarang (2017)
3.	Mengapa anda pilih Bali sebagai liburan anda ?	Bali sangatlah dekat dari Aussie, kemudian penduduk bali sangatlah ramah dan unik, segalanya murah, dan saya pikir Bali adalah rumah kedua saya, hahaha
4.	Kemudian ketika anda mengatakan visa gratis, dari siapakah itu ? dan dapatkah saya bisa bertanya sedikit hal tentang Travel warning yang diterapkan ke Indonesia tersebut ? bagaimana menurut anda tentang Travel warning ?	Tenang saja, tidak masalah Betul sekali, visa gratis tersebut adalah kebijakan dari Indonesia untuk beberapa negara dan warga negara Asing seperti saya termasuk Aussie. Kemudian terkait Travel Warning Aussie, hal yang sebenarnya peringatan tersebut diberikan kepada kita sebagai warga negara Aussie, dalam bentuk peringatan yang bersifat sebuah himbauan dan bukan sebagai hukum yang mengikat. Maka dari itu beberapa traveller terkadang tidak memperdulikan Travel warning tersebut karena segalanya kembali lagi kepada sang traveller.
5.	Kemudian apabila bukan hukum yang mengikat, apakah mungkin ada ketentuan lain apabila travel warning tersebut berada di level yang tinggi ?	Pertanyaan yang jenius, hahaha terkait ketentuan lain pun juga tidak ada kalau dari pengalaman saya, tetapi perbedaannya hanya ketika travel warning tersebut pada level yang tinggi pembuatan berkas ke luar Aussie memakan waktu yang agak lama. Yang biasanya dapat diselesaikan sekitar 1 – 2 minggu, menjadi 2 – 3 bulan karena pembuatan berkas – berkasnya menggunakan sistem teknologi yang diatur semuanya oleh pemerintah Aussie
6.	Terima kasih sekali buat waktu dan informasinya, see you at downtown Sheryl	Okay, see you broo !!!

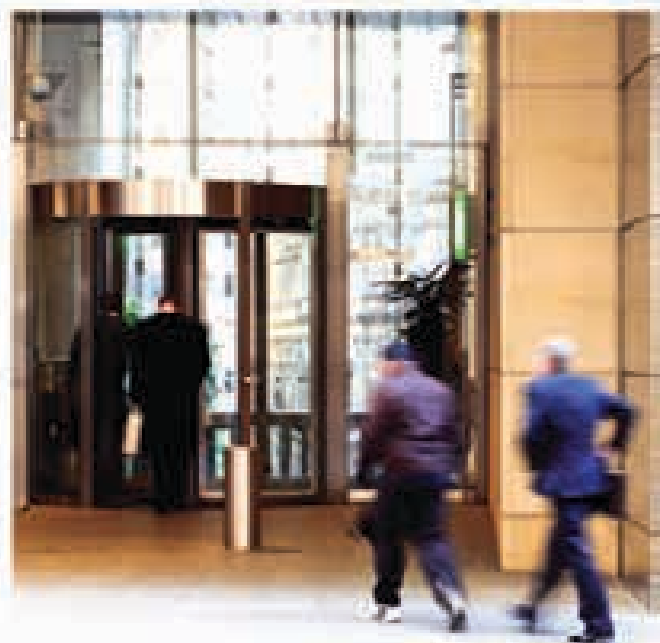
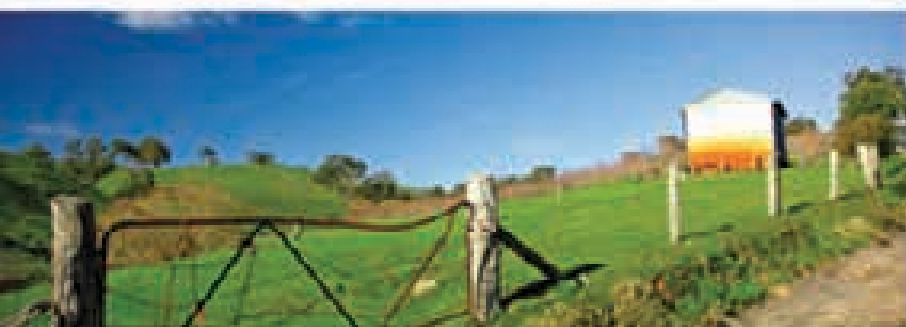


Australian Government

AUSTRALIA IN THE ASIAN CENTURY



White Paper
October 2012



Foreword



Predicting the future is fraught with risk, but the greater risk is in failing to plan for our destiny. As a nation, we face a choice: to drift into our future or to actively shape it.

That is why I commissioned the Australia in the Asian Century White Paper. I took a clear decision that our nation should actively plan for and shape our national future. Only by doing so can we realise our vision of being a land of increased opportunity, prosperity and fairness.

Whatever else this century brings, it will bring Asia's rise.

The transformation of the Asian region into the economic powerhouse of the world is not only unstoppable, it is gathering pace.

In this century, the region in which we live will become home to most of the world's middle class. Our region will be the world's largest producer of goods and services and the largest consumer of them.

History teaches us that as economic weight shifts, so does strategic weight.

Thriving in the Asian century therefore requires our nation to have a clear plan to seize the economic opportunities that will flow and manage the strategic challenges that will arise.

There are also great social and cultural benefits to be had from broadening and deepening our people-to-people links across the region.

Our nation has benefited from Asia's appetite for raw materials and energy. The challenge we must now address is how Australia can benefit from what Asia will need next.

Australians do not come to these tasks empty-handed.

Our economy is strong because over the past 30 years we have been prepared to do the things that are necessary to build for tomorrow. This approach has given us 21 years of continuous economic growth.

As a nation we pulled together during the Global Financial Crisis to successfully avoid recession and the loss of hundreds of thousands of jobs.

As a result of our courage to shape the future and our decisive action during the Global Financial Crisis we come to this century of change with economic strength.

Government has shown the fortitude to identify the right changes and get them done, in order to give us a more prosperous tomorrow.

We also have the benefits that come from a track record of engagement with the nations of our region. Our principal relationships with China, India, Indonesia, Japan and the Republic of Korea have strengthened in recent years. Our alliance with the United States remains as strong as ever.

Our institutional regional engagement combines the ongoing strength of the Asia–Pacific Economic Cooperation (APEC) forum with the now-developing East Asia Summit. Our people-to-people links are also expanding as business, travel, communications and study relationships in our region continue to grow.

But we must build on all of these strengths combined if we are to seize the opportunities of the Asian century.

I want our nation to be a winner as our region changes and I want every Australian to be a winner too.

Put simply, as a Labor Prime Minister I want the new opportunities that will come in this century to be seized and shared. I want us to take an approach to the looming change that is farsighted and focused on fairness.

This White Paper is a plan to build on our strengths and shape our future.

It details how, by 2025, Australia can be a winner in this Asian century by becoming more prosperous, more resilient, and sharing the new opportunities.

It calls on all of us to play our part in becoming a more Asia-literate and Asia-capable nation.

The Australian Government will play its part in leading our nation to this vision of the future during a time of enormous change. Like past Labor governments, we will manage and shape change with the aim of providing better opportunities for all.

I commend this White Paper to you and ask you to play your part in shaping our future.

A handwritten signature in dark ink, reading "Julia Gillard". The signature is fluid and cursive, with a horizontal line at the end.

Julia Gillard

Prime Minister of Australia

The Hon. Alexander Downer, MP
FORMER MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS



ARCHIVED MATERIAL

Joint Media Release

Minister for Foreign Affairs, the Hon Alexander Downer MP and the Minister for Justice and Customs, Senator Chris Ellison

16 October 2002

Joint Investigation and Intelligence Team to Investigate Bali Bombing

In Jakarta today we have held productive discussions with the President of Indonesia, HE Mrs Megawati Soekarnoputri, the Minister of Foreign Affairs, HE Dr Hassan Wirajuda, the Co-ordinating Minister for Political and Security Affairs, HE General Bambang Yudhoyono and the Minister for Justice and Human Rights, HE Prof Yusril Ihza Mahendra.

We expressed our sincere condolences to the people of Indonesia, in particular to the families of the victims, following the tragic loss of innocent lives in Bali on Saturday.

The Indonesian Government also extended its sympathy to the Australian people.

Both governments strongly condemned the bombing as a cowardly act of terrorism and agreed to pursue those responsible with relentless resolve to ensure that they are brought to justice.

Australia and Indonesia have agreed to establish a Joint Investigation and Intelligence Team to investigate the Bali bombing.

Officials from both countries are now working together to finalise arrangements and to ensure that the very best of Australian and Indonesian expertise will be applied to this crucial task.

We will hold discussions with other countries affected by the incident about contributions that they could make towards the investigations.

This agreement is made possible under the auspices of the Memorandum of Understanding on Combating International Terrorism signed by President Megawati and Prime Minister Howard in February this year.

The Joint Investigation and Intelligence Team will build on existing co-operative efforts with Indonesian authorities that have seen 45 Australian Federal Police officers undertake investigative and victim identification work in Bali.

Media inquiries: Chris Kenny (Ministerial) +61 02 6277 7500 / Mairi Barton (Senator Ellison's office) 02 6277 7260

Local Date: Tuesday, 07-Jan-2014 10:28:41 EST

Copyright [Commonwealth of Australia](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#).

